



**PELAKSANAAN SISTEM *SELF ASSESSMENT* DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

DIANA TANTRI CAHYANINGSIH, SH
NIM. B4A.096.065

Pembimbing

1. Prof. DR. H. MIYASTO
2. DR. MOEMPOENI MARTOJO, SH

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

**PELAKSANAAN SISTEM *SELF ASSESSMENT* DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG**

Oleh :

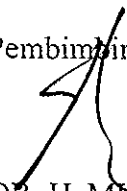
DIANA TANTRI CAHYANINGSIH, SH
NIM. B4A.096.065

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

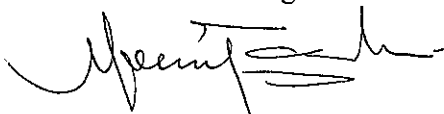
Pada tanggal 1 Juli 2002

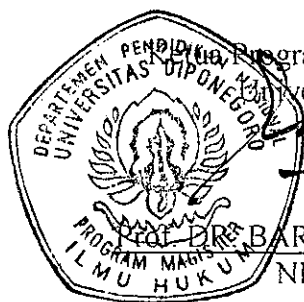
Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I

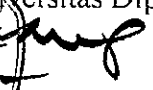

(Prof. DR. H. MIYASTO)
NIP. 130.516.585

Pembimbing II


(DR. MOEMPOENI MARTOJO, SH)
NIP. 130.324.140



Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
NIP. 130 350.519

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

MOTTO

"DEMI WAKTU. SESUNGGUHNYA MANUSIA ITU BENAR-BENAR BERADA DALAM KERUGIAN. KECUALI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH, DAN NASIHAT-MENASIHATI SUPAYA MENTAATI KEBENARAN DAN NASIHAT MENASIHATI SUPAYA MENETAPI SABAR."

(Q.S. AL-`ASR : 1-3)

" HAI ORANG YANG BERIMAN! HENDAKNYA KAMU MENJADI ORANG-ORANG YANG BENAR-BENAR BERDIRI MENEGAKAN KEBENARAN KARENA ALLAH DAN MENJADI SAKSI UNTUK KEADILAN. JANGANLAH KAMU DIDORONG OLEH PERMUSUHAN TERHADAP SESUATU KAUM, SAMPAI KAMU TIADA BERLAKU ADIL. BERBUAT ADILLAH KAMU! KARENA KEADILAN ITU LEBIH DEKAT KEPADA TAQWA; DAN BERTAQWALAH KAMU KEPADA ALLAH, SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA MENGETAHUI APA YANG ENKKAU KERJAKAN.

(Q.S. AL MAIDAH : 8)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul : Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kota Semarang, dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini selanjutnya dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih derajat Magister dalam Ilmu Hukum pada Program PascaSarjana Universitas Diponegoro Semarang. Hanya karena pertolongan Allah SWT dan bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen terutama Dosen Pembimbing, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

Untuk itu teriring do'a semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal sholeh, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Pasca Sarjana HUKUM Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, g telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dorongan serta kedisiplinan dan kejujuran ilmiah yang selalu dicontohkan.
2. Prof. Dr. Miyasto, yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Moempoeni Martoyo, SH., yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., dengan kepakarannya dan integritasnya dalam pengembangan ilmu hukum telah membuka

pikiran dan wawasan penulis, mendorong untuk haus dan rakus pada ilmu pengetahuan, dan telah memberikan contoh integritas yang luar biasa pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pendidikan.

5. Para Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bimbingan dan menularkan ilmunya kepada penulis.
6. Pimpinan dan Staf KPP Semarang Timur, KPP Semarang Selatan dan KPP Semarang Barat dan Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak.
7. Pimpinan dan staf Dep. Keu Direktorat Jenderal Pajak Kanwil X Jawa Tengah dan DIY, khususnya bidang IAP yang telah memberikan bantuan dan informasi data, sehingga penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan.
8. Segenap Pengelola Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang dengan penuh kesabaran membantu dan melayani penulis selama kuliah maupun dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Ibunda Suci Ningsih, dan Ayahda Drs. Hari Soewarno tercinta, yang telah mendidik, mengasuh, membiayai dan selalu mendoakan penulis, teriring do'a : " Ya Allah, Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan berilah kasih sayang-Mu sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kami."
10. Saudara-Saudaraku : Mbak Alvin Tantri Hastutiningsih , SH. dan Mas Purnomo , SH., Adikku Lilik Triasmoro, Wahyu Setiadi, Eny Yuliaty, juga sepupuku Erwan, yang selalu memberi motivasi dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi penulis.

11. Sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dan masukan terhadap penulis , dalam penulisan tesis ini : Mas Ali Sholeh, SE., Mbak Ari Purwanti, Mbak Maya, Mbak Indri.
12. Rekan-rekan dari Magister Hukum, yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini, yaitu Mbak Haniem, SH.Mhum, Pak Purwanto, SH.Mhum, Diah Irawati, SH, Pak Nuswantoro, SH., Pak Kuswiyono, SH. Dan juga rekan-rekan dari Magister Notariat : Mbak Ari, Mbak Santi, Mbak Dian. Juga Mbak Fahim, yang selama ini banyak membantu penulis dalam mencari bahan pustaka
13. Dan juga pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian dengan keterbatasan tersebut, pada akhir pengantar ini penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam studi Hukum Ekonomi dan Teknologi.

Semarang, Juni 2002

Penulis

DIANA TANTRI CAHYANINGSIH

ABSTRAK

Sistem *Self Assessment* adalah sistem dalam pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak berperan aktif dalam sistem perpajakan. Sistem ini, diharapkan administrasi perpajakan dapat lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak (*tax-consciousness*) dan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Saat ini pajak penghasilan adalah pajak yang memberi kontribusi terbesar dalam penerimaan APBN dibandingkan pajak lainnya; akan tetapi khususnya dari sektor pajak penghasilan Orang Pribadi selama ini belum memberikan kontribusi yang optimal seperti yang diharapkan.

Dengan didasarkan pada pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui bagaimanakah sistem *self assessment* diterapkan dalam pajak penghasilan Orang Pribadi, hambatan apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment* pada pajak penghasilan Orang Pribadi dan upaya mengatasinya, dan bagaimanakah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebagaimana yang diamanatkan di dalam reformasi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem *self assessment* yang diterapkan dalam pajak penghasilan orang pribadi; mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang berpengaruh secara signifikan dalam pelaksanaan *self assessment* pajak penghasilan Orang Pribadi dan upaya mengatasinya hambatan tersebut; mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebagaimana yang diamanatkan reformasi perpajakan.

Teori yang digunakan di dalam *self assessment* ini sesuai dengan teori menurut David Osborne dan Ted Gaebler tentang *Reinventing Government* yaitu adanya transformasi sektor publik dengan jiwa kewirausahaan.

Penelitian ini dilakukan di Semarang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dilengkapi yuridis sosiologis dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan analisis menggunakan teknik induktif dengan model interaktif.

Dari studi ini ditemukan bahwa: pertama, secara normatif dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), menganut sistem *self assessment* akan tetapi ternyata masih adanya rumusan pasal-pasal undang-undang tersebut yang mengingkari atau bertentangan dengan *self assessment*, yaitu: penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara Jabatan (Pasal 2 ayat (4) UU KUP, pungutan melalui pihak ketiga (with holding sistem) pada pasal 21,22,23,24 dan pasal 26 UU PPh, pungutan yang bersifat final (pasal 4 ayat (2) UU PPh, pemeriksaan pajak yang mengarah ke official assessment. Di lapangan masih adanya peran aktif fiskus dengan mengirimkan SPT ke alamat Wajib Pajak. Kedua, saat ini *self assessment* tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan bersifat intern dan ekstern. Ketiga, upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi perpajakan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan perubahan ekonomi nasional maupun global, sehingga menghasilkan peraturan yang akomodatif.

Hendaknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan *self assessment* secara murni (*full assessment*), karena sesuai dengan keadaan dan perkembangan di dalam masyarakat kita belum bisa. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan kerja sama dengan instansi lain, dalam meningkatkan profesionalisme dan pelayanan perpajakannya kepada masyarakat.

ABSTRACT

Self assessment system is tax taking system which give full trust to the taxpayer to estimate, calculate, and pay by themselves the debited tax. This is purposed to empower taxpayer to become active in taxation system. This system, is expected to lean, to drive, to simplify the taxation administration and to easy to be understood by taxpayer. Furthermore, can emerge tax-consciousness and tax compliance in tax paying, then can raise state tax sector revenue. Recent, income tax is the biggest tax contributor in the revenue in APBN compare to other taxes, in this income tax, especially, individual has not given optimal contribution as expected.

Based on stated thinking , it is necessary to do study to know how self assessment is implemented in personal tax income. What barriers significantly influence self assessment implementation to income tax and effort to solve, and how the government effort to raise income tax revenue as a mandate of tax reformation.

Theory being used in this self assessment in line with David Osborne and Ted Gaeber theory on reinventing government, that is public sector transformation with entrepreneurship.

This research done in Semarang using normative juridical approach completed with sociological juridical and qualitative research method. Analysis uses inductive techniques with interactive model.

The findings of this study are: first, normatively in Act 16/2000 about general understanding and taxation procedures (UU KUP) and Act 17/2000 about Income tax (UU PPh), follow self assessment system, but still there any articles of that Act contrary with self assessment, those are: the publish of taxpayer main number (NPWP) in post order (Article 2 verse (4) UU KUP, tax levied through third party (with holding system) in article 21, 22, 23, 24, and 26 UU PPh, tax investigation leading to official assessment. There still fiscus active role in the field, sending SPT to the address of taxpayer. Second, self assessment can not implement optimally at this moment, because of internal and external obstacles. Third, government effort to raise tax revenue with tax reformation as a way to appropriate with national and global economy changes, therefore yield in accommodative regulation.

Government should reexamine full self assessment policy, because it is not suitable with the condition of our society. Tax General Directorate should co work with other institution, in improving it professionalism and taxation service to society.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	9
E. Kontribusi Penelitian	10
C. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika penulisan	24

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. SISTEM *SELF ASSESSMENT*

A.1. Pengertian Sistem	25
A.2. <i>Self Assessment</i>	27
A.3. Sistem Pemungutan Pajak	28

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

B.1. Pengertian Pajak	31
B.2. Dasar Hukum Pajak	35
B.3. Hukum Pajak	37
B.4. Asas Dan Syarat Pemungutan Pajak	
B.4.1. Asas-Asas Pemungutan Pajak	41
B.4.2. Syarat-syarat Dalam Pemungutan Pajak...	43
B.5. Teori Pemungutan Pajak	46

B.6. Fungsi Pajak	49
B.7. Jenis-jenis Pajak	51

C. PAJAK PENGHASILAN

C.1. Pengertian Pajak Penghasilan	54
C.2. Obyek Pajak Penghasilan	57
C.3. Subyek Pajak Penghasilan	62
C.4. Tarif Pajak Penghasilan	65
C.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak	67

D. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

D.1. Pengertian Orang Pribadi	69
D.2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Pelaksanaan <i>Sistem Self Assessment</i> Di Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi	72
3.2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan <i>Sistem Self Assessment</i> Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Upaya Mengatasinya di Kota Semarang.	
3.2.a. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan <i>Sistem Self Assesment</i> Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Semarang.....	118
3.2.b. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang dalam mengatasi hambatan-hambatan dari pelaksanaan <i>Sistem Self Assessment</i> pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi	134
3.3. Upaya Pemerintah Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebagaimana Yang Diamanatkan Reformasi Perpajakan Nasional.	
3.3.1. Reformasi Undang-Undang Perpajakan sebagai upaya meningkatkan penerimaan	

pajak.....	141
3.3.2. Perubahan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.....	153
3.3.3. Keunggulan Strategis Dan Kelemahan-Kele- mahan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.....	162

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN	169
4.2. SARAN	174

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPSP	: Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KUP	: Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OP	: Orang Pribadi
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPNBM	: Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Barang Mewah
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
PKP	: Penghasilan Kena Pajak
PSPN	: Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	: Surat Ketetapan Pajak Nihil
SPT	: Surat Pemberitahuan (Tahunan dan Masa)
SSP	: Surat Setoran Pajak
STP	: Surat Tagihan Pajak
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WP	: Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menyukseskan pembangunan nasional¹, peranan penerimaan negara sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Tidak mungkin dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana, terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih pada kemampuan bangsa sendiri yaitu melalui meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, setiap tahun volume penerimaan dalam negeri melalui APBN terutama dari pajak senantiasa diupayakan untuk selalu meningkat.

Setelah terjadinya "*oil boom*" pada periode tahun 1980-an harga minyak bumi di pasaran dunia berangsur-angsur mengalami penurunan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap penerimaan negara karena sektor minyak dan gas alam pada waktu itu merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan

1. Pembangunan merupakan suatu proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk sehingga segala kebutuhan terpenuhi, yang meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Rochmat Soemitro, Pajak Dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1988, hal.2

nasional.² Turunnya harga minyak tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi perekonomian Indonesia, karena sebagian besar devisa Indonesia yang merupakan sumber utama penerimaan negara pada tahun 1980-an diperoleh dari hasil minyak bumi. Sehingga pemerintah berusaha mencari sumber alternatif lain untuk penerimaan dalam negeri yaitu dari sektor pajak. Hal ini selaras dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional harus dibiayai dengan sumber dana dari masyarakat yang merupakan indikator kemandirian dan kegotongroyongan nasional. Maka peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan sangat diharapkan.

Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, menempuh dengan melalui berbagai cara yaitu :

- a. Perluasan wajib pajak, dalam arti menjaring wajib pajak sebanyak mungkin.
- b. Penyempurnaan tarif pajak, dan
- c. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.³

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak (*revenue oriented*), maka pemerintah melakukan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (*Tax Reform*) pertama pada tahun 1984, sebagaimana yang diamanatkan didalam TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pada Bab IV Pola Umum Pelita Ke Empat dibawah D 13, yang menyatakan bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan

2. Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 1997, hal.335

3 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 10-11.

negara di luar minyak dan gas bumi, sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan juga harus makin mampu dan bersih.⁴

Reformasi Perpajakan (*tax reform*) pertama tahun 1983 tersebut, terutama dilatar belakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan turunnya harga minyak dipasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak bumi dipasar dunia mengalami penurunan secara terus-menerus dan sangat drastis.⁵

Di dalam reformasi perpajakan I tahun 1983 ini, terdapat perubahan yang mendasar dalam sistem pemungutan pajak yaitu dari *Sistem Official Assessment* menjadi *Sistem Self Assessment*. Dalam Undang-undang perpajakan *Sistem Self Assessment* dimaksudkan bahwa setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang (*tatbestand*) wajib membayar pajak, dimana anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Menurut Miyasto⁷, dalam *Sistem Self Assessment* wajib pajak tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan.

4. Rochmat Soemitro, Pajak Penghasilan, PT. Eresco, Bandung, 1990, hal. 3.

5. Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi, FE UNDIP, Semarang 6 Desember 1997, hal. 9.

6. Moenaf H. Regar, Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Publik, Bumi Aksara, 1993, hal. 5.

7. Miyasto, Loc.cit, hal.9.

Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak dalam melaksanakan sistim perpajakan nasional.

Sistem *Self Assessment* lebih menekankan bahwa Wajib Pajak harus berperan aktif tanpa adanya campur tangan *fiskus* (Direktorat Jenderal Pajak), sehingga mengandung konsekuensi bahwa masyarakat harus benar-benar tahu peraturan perpajakannya, mengetahui tata cara penghitungan pajak, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. Dengan perkataan lain, Sistem *self assessment* melimpahkan kewajiban pajak sepenuhnya kepada wajib pajak, sedangkan *fiskus* hanya melakukan pembinaan, pengawasan dan penelitian terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga dengan sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan merupakan salah satu dari UU yang lahir dari Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional tahun 1983, kemudian dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan pajak (*tax adjustment*) tiga kali (perubahan tahun 1991, tahun 1994 dan terakhir tahun 2000). Peraturan Pajak Penghasilan sekarang ini yang berlaku adalah UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung⁸ yang dipun-

8. Pajak Langsung adalah keadaan dimana Wajib Pajak harus memikul sendiri utang pajaknya kepada fiskus dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dilakukan secara periodik dan berulang-ulang kepada setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat

gut oleh pemerintah pusat dan merupakan pajak negara, sehingga beban pajak ini menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dan pelaksanaan pemungutan di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.¹

RAPBN tahun 2000, pajak memberi kontribusi penerimaan negara yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 82,510,0 triliun atau 60 % dari keseluruhan pendapatan negara dan hibah yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 137,695,7 triliun. Angka tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 53,018,4 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 26,258,4 triliun, PBB dan BPHTB sebesar Rp. 2,900,7 triliun dan Pajak lainnya sebesar Rp. 432,5 miliar.² Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memberi kontribusi terbesar pada RAPBN dibandingkan pajak yang lainnya.

Adanya krisis moneter yang berkepanjangan yang menimpa negara kita sejak tahun 1997, secara langsung maupun tidak langsung telah ikut mempengaruhi berkurangnya penerimaan pajak khususnya pada pajak penghasilan dari sektor usaha. Hal ini di karenakan banyaknya perusahaan-perusahaan (badan usaha) yang mengalami kesulitan likuiditas, mengalami kebangkrutan (*kolaps*) bahkan menutup perusahaannya. Maka dalam upaya mencapai sasaran meningkatkan penerimaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) perlu dilakukan intensifikasi dan

...Continued...

oyektifnya. Rimsky K. Judisseno, Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal.16.

1.Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, Buku Pertama, Prima Kampus Grafika, Jakarta, 1992, hal. 103.

2.Berita Pajak, No. 1412, 1 Februari Tahun 2000, hal.8.

ekstensifikasi dalam penerimaan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yang menurut Direktorat Jenderal Pajak selama ini dirasakan masih kurang dibandingkan dengan penerimaan Pajak Penghasilan atas Badan.¹¹ Hal ini dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan) yang terdaftar hanya 1,3 juta dari penduduk yang jumlahnya 200 juta atau sekitar 50 juta Kepala Keluarga, yang memasukkan SPT hanya 430 ribu.¹²

Walaupun telah beberapa kali mengalami perubahan perundang-undangan pada pajak penghasilan dengan adanya reformasi UU perpajakan (tahun 1991, 1994, dan 2000), di dalam pelaksanaannya, Sistem *Self Assessment* tetap dipertahankan berlakunya, sebagaimana yang tertuang di dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yaitu pada penjelasan umum, angka 3 (tiga) bahwa :

" Perubahan UU Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan Sistem *Self Assessment*.

Pemungutan pajak dengan Sistem *Self Assessment* ini, mengandung konsekuensi Wajib Pajak mengetahui segala peraturan perpajakannya. Oleh karena itu banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji berkaitan dengan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak khususnya di dalam pajak penghasilan Orang Pribadi/Perorangan. Didalam prakteknya

11. Kompas 14 April 1998, hal.4.

12. Berita Pajak, No. 1444, 1 Juni 2001, hal. 15.

pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* masih banyak ditemui kendala-kendalanya, yaitu dibuktikan masih banyaknya Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pajak, mengalami kesulitan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT), Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang dikirim tidak dikembalikan, pengisian tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan masih banyaknya Wajib Pajak yang seharusnya berkewajiban sebagai Wajib Pajak tidak mempunyai NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan kata lain dalam kenyataannya peranan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam mendukung penerimaan negara pada Pajak Penghasilan secara keseluruhan belum optimal seperti yang diharapkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pajak merupakan suatu perikatan antara pemerintah (*fiskus*) dan masyarakat Wajib Pajak yang memuat tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengaturannya sesuai dengan ketentuan dari pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa : " *Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan atas Undang-Undang*".

Sebagai suatu perikatan yang lahir dari undang-undang, maka yang dinilai dan dikaji tidak hanya penerapannya tetapi juga menilai peraturan yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan faktor hukum (peraturan perundang-undangnya), kesadaran hukum masyarakat Wajib Pajak dan *fiskus* (aparatur pajak) memegang peranan sentral. Realitas yang demikian ini tercermin dari

penerapan *Sistem Self Assessment* dalam pemungutan pajak.

1. Didalam *Sistem Self Assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan fiskus berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan pajak. Sistem ini berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Yang menjadi permasalahan adalah *Sejauhmana Sistem Self Assessment* dilaksanakan didalam Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi ?

2. *Sistem Self Assessment* pada Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi didalam implementasinya ditemukan adanya hambatan-hambatan, misalnya masih adanya ketidakjujuran Wajib Pajak didalam pembayaran pajaknya juga masih terbatasnya jumlah Wajib Pajak pada PPh Orang Pribadi bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya , sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap tujuan dari pemungutan pajak.

Yang menjadi permasalahannya adalah hambatan-hambatan apakah yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *Sistem Self Assessment* pada Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan upaya apa yang dilakukan pemerintah mengatasi hambatan-hambatan yang timbul

tersebut ?

3. Peranan Pajak dalam pembangunan sudah tidak dapat disangsikan lagi, mengingat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi tidak stabil sehingga sudah tidak bisa diharapkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara. Akibatnya sebagai tumpuan dalam pembiayaan pembangunan negara, penerimaan dari sektor pajak menjadi prioritas utama. Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara guna peningkatan penerimaan negara ini dari sektor perpajakan diantaranya adalah mengadakan reformasi perpajakan, dan salah satunya adalah reformasi perpajakan pada Pajak Penghasilan.

Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimanakah upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan agar dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam reformasi perpajakan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, menganalisis dan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem *self assessment* dalam Pajak Penghasilan khususnya dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem *self assessment* yang dilaksanakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pengham-

bat yang berpengaruh secara signifikan dalam pelaksanaan *self assessment* pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan sebagaimana yang diamanatkan reformasi perpajakan.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran yang berarti bagi hukum pajak yang berkaitan dengan Sistem *Self Assessment* pada Pajak Penghasilan (PPh) yang selama ini lebih mengorbankan Sistem *Self Assessment* secara murni sebagai upaya meningkatkan pajak penghasilan bagi penerimaan negara.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan di dalam implementasi Sistem *Self Assessment* umumnya dan pada pajak penghasilan pada khususnya di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya.

E. KERANGKA TEORITIS

Kebijakan perpajakan terutama sejak dilakukan *tax reform* yang dilakukan sejak tahun 1983 yaitu dengan melakukan pembaharuan terhadap Sistem Perpajakan Nasional (SPN) sebagaimana di tuangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000. Menurut Salamun AT, pembaharuan

ini bertujuan antara lain : kemandirian pembiayaan pembangunan, kesederhanaan, kepastian hukum dan menutup peluang penyalahgunaan wewenang, baik oleh Wajib Pajak maupun aparat pajak (*fiskus*).¹³ Titik berat pembaharuan tersebut adalah dengan diberlakukannya sistem *self assessment*.

Didalam pemungutan pajak bahwa pengertian Sistem *Self Assessment* menurut Rochmat Soemitro adalah menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan membayar pajak tersebut sebelum memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).¹⁴

Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebetulnya tidak menggunakan kata "*Self Assessment*", tetapi dalam pasal 4, diletakkan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk mengisi SPT, dengan benar, menghitung sendiri Pajak Penghasilan yang terutang, serta membayar jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam kas negara.

Menurut Miyasto, dalam Sistem *Self Assessment*, wajib pajak tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan.¹⁵ Sedangkan menurut Gunadi, sistem ini dalam rangka *reinventing goverment* (penataan kembali fungsi Direk-

13. Salamun AT,ed, Agustin Asikin, Tika Noorjaya, Yulia Himawati, Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1991, hal. 57.

14. Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan 2, Eresco, bandung, 1991, hal: 13.

15. Miyasto, op. cit, hal.9.

torat Jenderal Pajak) dan *empowering people* (peningkatan partisipasi masyarakat terhadap negara).¹⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat David Osborne dan Ted Gaebler tentang *Reinventing Government*¹⁷ yaitu antara mengharapkan adanya transformasi sektor publik dengan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) dengan melepaskan aktivitas pelaksanaan administratif, yang mampu dilakukan oleh masyarakat. Maka hal ini kaitannya dengan kewajiban perpajakan yaitu beralihnya penghitungan beban pajak pada *fiskus* dengan dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri.

Dalam Sistem *Self Assessment*, diharapkan dalam diri Wajib pajak yaitu :

- a. *Tax consciousness* atau kesadaran pajak oleh wajib pajak.
- b. Kejujuran wajib pajak.
- c. *Tax mindness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
- d. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh UU seperti memasukan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya tanpa diperingatkan untuk melakukan hal ini.¹⁸

16. Gunadi, Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak, Abdi Tandur, Jakarta, 1999, hal. 38.

17. David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi, Reinventing Government*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.

18. Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan II, PT. Eresco, Bandung, 1991, hal.14.

Menurut Rochmat Soemitro, pada umumnya orang segan membayar pajak, karena pajak tidak memberikan imbalan secara langsung seperti jual beli, tukar menukar, sewa beli dan sebagainya yang nyata bahwa dari uang yang dikeluarkan diterima kembali sesuatu. Sebaliknya, orang yang kesadarannya tebal, yang mengerti fungsi pajak dalam masyarakat, dan mengerti dampak pajak dalam masyarakat, dan mengerti dampak pajak pada individu, akan dengan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa dipaksa.¹⁹

Disamping itu, ditambahkan beliau bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga belum dapat melaksanakan *self assessment* ini dengan baik. Untuk mencapainya diperlukan beberapa waktu, sehingga *self assessment* ini tidak dapat segera memenuhi harapan kita.²⁰ Sehingga didalam pelaksanaannya adanya hambatan-hambatan, untuk itu masih perlunya campur tangan pemerintah selama ini masih harus dilakukan secara intensif.

Seperti halnya jenis-jenis pajak yang lain, Pajak Penghasilan hendaknya dapat mendukung terlaksananya dua fungsi pajak yaitu pajak sebagai fungsi budgeter dan fungsi regulasi.²¹ Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan

19. Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Eresco, Bandung, 1991, hal. 91.

20. Ibid.

21. Miyasto, Segi-Segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Makalah Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke 41, tahun 1998, hal. 1.

fungsi budgeter (memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara) yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) mulai tahun 1983 dan terakhir tahun 2000. Reformasi perpajakan ini yaitu dengan mengeluarkan dan mengadakan perubahan UU , dan khususnya pada Pajak Penghasilan dengan UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, kemudian yang terakhir, mengalami perubahan dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Melalui reformasi perpajakan dengan perubahan perundang-undangan secara berkesinambungan tersebut, maka hukum pajak sebagai perangkat sosial diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan yang berkembang dimasyarakat.

Ini berarti hukum tidak hanya diharapkan untuk bekerja dilingkungan otoritas belaka, melainkan juga sebagai sarana "*social engineering*", yaitu "penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.²²Di dalam bukunya tentang Ilmu Hukum, Satjipto Raharjo, penggunaan hukum secara sadar tersebut yaitu Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial, dijelaskan sebagai berikut :

" Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara

22. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 142.

sadar oleh masyarakatnya. Disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen".²³

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 2 model pendekatan yaitu pendekatan yang bersifat *Yuridis Normatif* dan pendekatan *yuridis sosiologis*²⁴.

Untuk mencapai tujuan pada penelitian **Pertama** dan **Ketiga**, pada penelitian ini lebih ditekankan pada pendekatan yang bersifat yuridis normatif (*normative legal approach*), hal ini dilakukan karena didalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan sistem *self assessment* mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu pada UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan

23. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 206.

24. Penyebutan lain sosiologis adalah empiris. Penelitian empiris merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang satu dengan yang lain, harus saling mendukung agar supaya penelitian yang dilakukan mempunyai nilai ilmiah dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas F.H. UNDIP, 14-15 Mei 1999, Semarang, hal. 20.

Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah lainnya.

- Kegiatan dalam penelitian yuridis normatif meliputi :
- a. memilih pasal-pasal yang berisi norma-norma hukum;
 - b. menyusun sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu;
 - c. menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada;
 - d. menyusun suatu konstruksi dengan persyaratan :
 - 1) mencakup semua bahan hukum yang diteliti,
 - 2) konsisten,
 - 3) memenuhi syarat-syarat estetis,
 - 4) sederhana.²⁵

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan atas 5 (lima) macam yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *inconcreto*, penelitian terhadap sistematik hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.²⁶

Akan tetapi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *inconcreto*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan seleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif perpajakan dan norma-norma sosial yang bukan hukum, sesudah diidentifikasi sebagai norma hukum, akhirnya dilakukan pengorganisasian norma yang sudah diidentifikasi tersebut dalam satu sistem yang komprehensif. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap asas hukum perpajakan yang terkandung dalam *self assessment* pada PPh

25. Rony Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 33.

26. Ibid, hal. 12

yaitu : adanya kepastian hukum, keadilan dan efisiensi. Sedangkan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, bahwa pelaksanaan dari *self assessment* pada pajak penghasilan Orang Pribadi diatur didalam UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian kedua, pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat **Yuridis Sosiologis** (*sociolegal research*). Menurut Sunaryati Hartono, penggunaan metode yuridis sosiologis dalam suatu penelitian disamping metode yuridis normatif akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.²⁷ Pada pendekatan yang bersifat **Yuridis Sosiologis**, untuk melihat hukum tidak hanya sebagai *Law in book* , tetapi melihat hukum sebagai *Law in action*.²⁸ Pendekatan ini dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum pajak selain sebagai bentuk aturan (*rule*) juga dikonsepskan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang mengarah pada Pelaksanaan *Self Assessment* dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan mengetahui faktor-faktor penghambat yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment*

27. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , Alumni, Bandung, 1994, hal. 4.

28. Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981, hal.6.

dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sehingga dengan digunakan pendekatan yang bersifat *Yuridis Normatif* dan pendekatan *yuridis sosiologis* diharapkan akan memperoleh gambaran yang lengkap dan komprehensif tentang pelaksanaan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan beberapa pertimbangan :

- a. menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
- c. lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian **Deskriptif Analitik**. Penelitian deskriptif berarti suatu penelitian yang berusaha memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini juga bersifat kualitatif induktif. Yakni secara induktif mencari dan menemukan suatu kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan berkaitan dengan pelaksanaan sistem *self assessment* pada pajak penghasilan Orang Pribadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang pelaksanaan *self assessment* tersebut.

29. Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal.5.

Selanjutnya dikatakan deskriptif analitik karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem *self assessment* dalam sistem pajak penghasilan orang pribadi, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan yang faktual dan akurat terhadap hasil penelitian.

3. Metode Penelitian Sampel

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang. Yang meliputi : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Timur, KPP Semarang Barat, KPP Semarang Selatan dan Kantor Wilayah VIII Ditjen Pajak Jawa Tengah - Yogyakarta di Semarang.

b. Sampel

Sampel ditentukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan cara menunjuk pihak-pihak yang dianggap dapat mewakili dan benar-benar mengetahui situasi sosial yang menjadi muara permasalahan dari obyek yang diteliti, juga karena terbatasnya dana, waktu dan tenaga peneliti, sehingga diperoleh sampel di Kantor Wilayah X Ditjen Pajak Jawa Tengah dan DIY, KPP Semarang Timur, KPP Semarang Barat, KPP Semarang Selatan dan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi.

c. Responden

Responden di dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Wilayah VIII Ditjen Pajak Jawa Tengah dan DIY di Semarang.

2. Kepala KPP Semarang Timur atau staf yang mewakili.
3. Kepala KPP Semarang Barat atau staf yang mewakili.
4. Kepala KPP Semarang Selatan atau staf yang mewakili.
5. Beberapa Wajib Pajak PPh Orang Pribadi

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yaitu data yang didapat dari Kantor Wilayah VIII Ditjen Pajak Jawa Tengah dan DIY, KPP Semarang Timur, KPP Semarang Barat, KPP Semarang Selatan dan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat mendukung data primer, yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, melainkan di peroleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. ³⁰. Dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, dilakukan dengan beberapa cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang kan diperoleh. Secara garis besar

30. Soerjono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 14.

data yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Atas dasar hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara mendalam³¹ dan wawancara terstruktur³² pada fiskus. Dan dengan menggunakan kuesioner pada wajib pajak. (Mencapai tujuan penelitian kedua).

Untuk itu, pengembangan (penelusuran) sumber informasi yang paling relevan dengan mengikuti prinsip *Snow Bowling* atau "*bola salju*" yaitu dengan prosedur mencari informasi sebanyak karakteristik elemen, yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui peneliti dan baru akan berhenti bilamana terlihat adanya indikasi sudah tidak muncul suatu variasi atau informasi baru.

b. Studi Kepustakaan dan dokumen.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) **Bahan hukum primer**, meliputi: berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Sistem *Self Assessment* pada Pajak Penghasilan yaitu UUD 1945 pasal 23, himpunan peraturan perundang-undangan yang

31. Rony Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 61.

32. Lexi J. Moleong, *op.cit.*, hal.138

berkaitan adalah UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah lainnya (Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Menteri Keuangan).

Bahan Hukum sekunder meliputi : Literatur yang relevan dengan penelitian, hasil temuan ilmiah (seminar, lokakarya), tulisan ilmiah maupun koran yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tertier, meliputi : Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

Studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data atau informasi berupa dokumen, bahan statistik dan bahan tulisan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Keuntungan data ini menurut Licoln dan Cuba adalah informasi yang telah tersedia dan siap pakai, peneliti tinggal memanfaatkan saja, karena relatif mudah dan murah untuk memperolehnya.³³

6. Tehnik Analisia Data

Mengingat data yang terkumpul adalah kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interaktif. Dengan demikian, data yang terkumpul akan dapat dianalisis melalui 3 tahap yaitu

33. Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990, hal. 28.

memilih data (reduksi data) , menyajikan data, serta menarik kesimpulan.³⁴

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah sebagai penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁵

Kegiatan tersebut terus-menerus, diulang-ulang sehingga membentuk siklus yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan. Data yang bersifat kuantitatif yang dipergunakan sebagai pendukung data kualitatif akan disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudian diinterpretasikan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk mengecek keakuratan dan kehandalan data, adalah teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini pengecekan validitas data digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.³⁶ Yaitu dengan teknik

34. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru), UI-Press, Jakarta, 1992, hal.16.

35. Ibid, hal. 16-18.

36. Lexi J. Moleong, op.cit hal. 178.

wawancara dan dokumen.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menggambarkan suatu keadaan dan menegaskan akan pentingnya dilakukan studi, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tesis. Sistem Perpajakan merupakan permasalahan yang sangat besar dan kompleks serta multidisipliner. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyadari keterbatasan kemampuan serta ruang dalam tesis ini, sehingga studi ini difokuskan pada Pelaksanaan *Sistem Self Assessment* dalam pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi di kota Semarang, yang menurut penulis belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya dirumuskan dalam tiga permasalahan utama. Permasalahan yang dirumuskan selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Dalam bab II kerangka teoritis diuraikan mengenai pengertian dari *Sistem Self Assessment*, tinjauan umum tentang pajak, tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dalam bab III akan dibahas menjadi tiga sub bab yaitu Pelaksanaan *Sistem Self Assessment* dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, hambatan-hambatan pelaksanaan *Sistem Self Assessment* dalam pajak penghasilan Orang Pribadi di Kota Semarang, dan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebagaimana yang diamanatkan reformasi perpajakan.

Bab IV merupakan bab terakhir akan diajukan beberapa kesimpulan dan saran yang pada hakekatnya merupakan kristalisasi dari analisis dan informasi data dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. SISTEM *SELF ASSESSMENT*

A.1. Pengertian

Pengertian Sistem, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, atau metode.³⁷

Satjipto Rahardjo memberi pengertian Sistem adalah :

1. Sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.
2. Sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.³⁸

Sedangkan menurut Pamudji, Sistem adalah

Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.³⁹

Menurut R. Tobias Subekti dan Asrori,

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri

37. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 950.

38. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, op.cit, hal.48.

39. S. Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.9-10.

dari bagian-bagian, yang mana bagian yang satu dengan bagian lainnya mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan, dalam suatu lingkungan yang kompleks.⁴⁰

Dari definisi **Sistem** tersebut dapat dikemukakan beberapa sifat dasar dari suatu sistem yaitu :

1. Setiap sistem selalu berusaha untuk mencapai tujuan.

Suatu sistem tidak bersifat statis, sistem selalu mengalami perubahan yang dinamis dan bergerak menuju pencapaian tujuan. Tujuan dari sistem umumnya adalah untuk meningkatkan tingkat kemanfaatan (*utility*) atau menciptakan tingkat kemanfaatan.

2. Setiap sistem selalu mempunyai beberapa sistem bawahan (subsistem) dan selalu menjadi bagian dari sistem yang lebih tinggi derajatnya (Suprasistem).
3. Suatu sistem dapat bersifat tertutup, atau dapat juga bersifat terbuka. Perbedaan sistem tertutup dan terbuka ini didasarkan atas hubungan sistem tersebut dengan lingkungannya.
4. Sistem mempunyai sifat kesatuan usaha (*wholism*), dimana sistem tersebut merupakan suatu totalitas dimana hasil keseluruhan atau nilai keseluruhan lebih penting dari jumlah bagian-bagiannya.
5. Setiap sistem membutuhkan adanya umpan balik (*feedback*). Umpan balik sangat diperlukan untuk mengerti bagaimana suatu sistem mencapai keseimbangan.

40. R. Tobias Subekti dan Asrori, Dasar-Dasar Perpajakan. Modul 6-9, Universitas Terbuka, Penerbit Karunika, Jakarta, 1986, hal. 111.

bangan. Juga sebagai alat pengendali sampai sejauhmana suatu sistem bergerak secara terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

6. Dalam suatu sistem selalu terdapat proses perubahan dari masukan (*input*) menjadi out put yang dilakukan oleh sistem, proses ini disebut *transformasi*.⁴¹

A.2. *SELF ASSESSMENT*

Pengertian *Self Assessment* terdiri dari kata *Self* dan *Assessment*. *Self* berarti diri, sendiri, dirinya, yang mengacu pada kebendaan, mempunyai pengertian menunjuk pada orang.⁴² sedangkan *Assessment* berarti taksiran, penaksiran, penilaian, beban, pembebanan, pemikulan.⁴³ Sehingga dapat diartikan sebagai penilaian sendiri atau taksiran sendiri.

Didalam pemungutan pajak bahwa pengertian *Sistem Self Assessment* adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.⁴⁴

41. Ibid, hal. 117-120.

42. John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 511.

43. Ibid, hal. 41.

44. Eugenia Liliawati Muljono, Tanya-Jawab Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Harvarindo, Jakarta, 1999, hal.21.

Ciri-Ciri *Sistem Self Assessment* yaitu

1. Wajib Pajak aktif sejak melakukan kewajiban pertamanya yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sehingga terdaftarnya mereka sebagai wajib pajak adalah atas kehendak wajib pajak sendiri.
2. Terlaksananya pemenuhan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT atas keaktifan wajib pajak sendiri.
3. Selama tahun berjalan, wajib pajak secara aktif melakukan perhitungan dan pembayaran masa (bulanan) dan memberitahukan tentang pelaksanaannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Aparatur perpajakan di dalam *sistem self assessment* adalah sebagai pembina, pembimbing dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan wajib pajak.⁴⁵

A.3. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya terdapat 3 sistem yang berlaku, yaitu⁴⁶ :

a). *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dilunasi atau terhitung oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus (aparat pajak). Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari fiskus.

Ciri-ciri *official assessment* adalah :

45. B. Boediono, *Tatacara Pelaksanaan Perpajakan I*, Modul 1-6, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1994, hal. 21-22.

46. Muqodim, *Perpajakan I (Dasar-Dasar Hukum Pajak, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*, FE UII, Yogyakarta, 1993, hal. 24-25.

1. Wajib pajak pasif, sedangkan aparaturnya harus aktif;
2. Keaktifan pada aparaturnya perpajakan sejak mulai mencari Wajib Pajak, mendaftarkan Wajib Pajak baru, mengirim SPT setiap tahunnya, memperingatkan wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPT, sampai pada masalah mengajukan keberatan dimana wajib pajak tidak disyaratkan menyebutkan berapa besarnya pajak terhutang menurut perhitungan Wajib pajak.
3. Meskipun telah terdaftar sebagai wajib pajak tidak otomatis membayar pajak, sebab timbulnya kewajiban membayar pajak bila telah menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak), baik SKP Sementara dalam tahun berjalan, SKP rampung setelah berakhirnya tahun takwim.
4. Peranan SPT merupakan sarana wajib pajak melaporkan obyek pajak yang diperoleh selama setahun takwim dan kekayaan yang dimiliki untuk dikenakan pajak.⁴⁷

b). *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dilunasi/terhutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak harus aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu : mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Fiskus hanya bertugas memberikan penyuluhan, penerangan, pengawasan dan verifikator.

c). *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berhubungan dengan jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak dihitung oleh pihak ketiga artinya bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).

47. B. Boediono, loc. cit. 22.

Contoh pihak ketiga ini misalnya : konsulen pajak, akuntan publik, wajib pungut atau wajib potong.

Sistem Self Assessment dapat dibedakan menjadi dua:

a. *Semi Self Assessment System*

Yaitu pemungutan pajak yang berhubungan dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar pada awal periode (tahun) ditaksir/ditentukan oleh wajib pajak atau pemungut pajak sebagai perhitungan sementara dan setelah periode (tahun) tersebut berakhir, pajak yang sesungguhnya ditentukan/ditetapkan oleh fiskus.

b. *Full Assessment System*

Yaitu pemungutan pajak yang berhubungan dengan dimana jumlah pajak yang terutang/dibayar dihitung sendiri oleh wajib pajak baik pada awal periode maupun setelah periode tersebut berakhir. Perhitungan awal periode merupakan perhitungan sementara dan pajak yang telah dibayarkan pada tahun berjalan nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap hutang pajak sesungguhnya menurut perhitungan setelah periode tersebut berakhir. Fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang kecuali wajib pajak atau wajib pungut menyalahi peraturan yang berlaku.⁴⁸

48. Muqodim, Op. cit, hal.25.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

B.1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu melalui pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk kepentingan bersama.

Sampai sekarang tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal. Banyak para ahli yang memberikan pengertian pajak sendiri-sendiri. Adapun batasan pengertian pajak menurut beberapa ahli tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak adalah Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.⁴⁹

Sedangkan menurut Seligman⁵⁰ pajak adalah

49. Rochmat Soemitro, 1992, op. cit., hal. 12.

50. Rochmat Soemitro, Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya, Eresco, Bandung, 1996, hal.2.

" suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum), tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya".

P.J.A. Andriani memberikan pengertian pajak adalah

" iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".⁵¹

Dari beberapa pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah :

- a. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
- b. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara: pengadilan atau menggunakan surat paksa.
- c. Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang.
- d. Pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidental.
- e. Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan ada jasa timbal balik secara langsung.
- f. Pajak mempunyai fungsi budgeter (sebagai sumber keuangan negara) dan fungsi mengatur.⁵²

Ditinjau dari segi hukum unsur pajak adalah lebih

51. R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, Bandung, hal.2.

52. Eko Lasmana, op. cit, hal. 6-7.

menitik beratkan kepada perikatan (*verbitenis*), pada hak dan kewajiban wajib pajak, subyek pajak dalam hubungannya dengan subyek hukum dan hak penguasa untuk mengenakan pajak. Maka dari segi hukum, pajak dapat didefinisikan :

"Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan).⁵³

Utang menurut pengertian hukum perdata adalah suatu perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perseorangan maupun badan) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi/tidak melanggar hak pihak lainnya.⁵⁴

Utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus, karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang.⁵⁵

Sedangkan bila ditinjau dari pendekatan segi ekonomi pajak dapat dilihat dari :

a). mikro ekonomi, dalam hal ini pajak dilihat dari

53. Rochmat Soemitro, 1992, *op.cit.*, hal. 51.

54. Rochmat Soemitro, Asas-Asas Dan Dasar Perpajakan 2, Eresco, Bandung, 1991, hal.1.

55. Ibid

segi kepentingan dan kebutuhan individu saja, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpikirkan. Akibatnya timbul pengertian yang salah tentang pajak, yaitu bahwa pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan karena ia mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli seseorang yang akhirnya mengurangi kesejahteraan individu ;

- b). **makro ekonomi**, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi income anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan income bagi masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat (negara).⁵⁶

Guna pajak ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayar pajak, tidak langsung kita peroleh dari pemerintah.

Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai rumah tangga negara.⁵⁷

Mengingat pajak mempunyai dampak yang luas didalam masyarakat, maka pajak harus dapat mencerminkan keadi-

56. Rochmat Soemitro, Ibid, hal. 53.

57. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid II Pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal.154.

lan. Didalam perpajakan dikenal adanya dua macam keadilan, yaitu keadilan yang horizontal dan keadilan vertikal. **Keadilan horizontal** mengandung pengertian bahwa pengenaan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata, yang berarti semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau yang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama, harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan **keadilan vertikal** berkenaan dengan penentuan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal ini berkaitan erat dengan penentuan besarnya tarif pajak. Beban pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan untuk membayar kontribusi guna membiayai kegiatan pemerintah. Kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) beban pajak dapat berupa penghasilan netto, berupa kekayaan maupun berupa pengeluaran belanja untuk konsumsi, atau kombinasi dari kedua atau ketiga ukuran tersebut. 58

B2. Dasar Hukum Pajak

Sebagai negara hukum maka di Indonesia segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk didalam pemungutan pajak. Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah.

58. R. Mansury, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid I, Uraian Umum dan Tentang Siapa-siapa yang dituju untuk dikenakan pajak, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994, hal.26-27.

Dalam pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

" Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang ".

Pada pasal ini tidak saja sebagai dasar hukum, melainkan juga merupakan dasar falsafah pemungutan pajak di Indonesia. Sebagai dasar falsafah ia mengharuskan pemerintah untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari rakyat melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Perlunya persetujuan DPR ini, karena DPR merupakan wadah wakil-wakil rakyat sehingga jika DPR menyetujui UU tentang pemungutan pajak maka berarti secara yuridis formal rakyat menyetujui pemungutan pajak itu sekalipun tanpa ada kontra prestasi (jasa timbal balik).⁵⁹

Oleh sebab itu, maka wajib bagi setiap anggota masyarakat Indonesia memenuhi pajaknya, dan wajib bagi pemerintah untuk mengusahakan agar para anggota masyarakat dengan benar dan mudah dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan bila perlu dapat memaksanya.⁶⁰

Falsafah yang tersirat dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 juga dijadikan falsafah dinegara lain , misalnya di Inggris yang menyatakan " *No taxation Without Representation*" (tidak ada pajak tanpa undang-undang), sedangkan

59. SF. Marbun dan Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal.132.

60. R. Suryono Sastrohadikusumo, Beberapa Catatan Mengenai Pajak-Pajak Di Indonesia, Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak (P-5), Jakarta, 1990, hal.1.

di Amerika menyatakan "*Taxation Without Representation is Robbery*" (Pajak tanpa undang-undang adalah perampokan).⁶¹

B.3. Hukum Pajak

Untuk dapat memahami hukum pajak, maka bertitik tolak dari apa yang dimaksud dengan hukum itu. Secara sistematis, Lili Rasjidi⁶², mengemukakan arti yang dipergunakan oleh kata "hukum" yaitu sebagai :

- a. Hukum adalah suatu hubungan diantara suatu persona dan suatu hal.
- b. Hukum adalah undang-undang atau disebut juga suatu komplek perundang-undangan.
- c. Hukum adalah suatu ilmu yang memberi pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang perundang-undangan dan pengetahuan tentang hubungan antara persona dan suatu hal.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo⁶³ bahwa

" Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah."

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto⁶⁴ bahwa hukum sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, tata hukum, petugas hukum, keputusan penguasa, proses pemer-

61. Rochmat Soemitro, op.cit. hal. 13-14.

62. Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985, hal.77-78.

63. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.41.

64. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hal.6.

intahan, perilaku ajeg, jalinan nilai-nilai serta sikap tindak yang teratur.

Dengan bertitik dari hukum sebagai undang-undang atau suatu kompleksitas perundang-undangan⁶⁵. Atas dasar pengertian tersebut, ada berbagai definisi Hukum Pajak yang dapat dikemukakan untuk mengungkap substansi, kekuasaan dan tugasnya.

Menurut Bohari Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".⁶⁶ Dalam peraturan tersebut diatur tentang subyek pajak, obyek pajak, timbulnya dan hapusnya hutang pajak, cara pemungutan pajak, dan cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Sedangkan menurut Santosa Brotodihardjo⁶⁷, yang mempersamakan hukum pajak dengan hukum fiskal, memberi definisi :

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Dua definisi hukum pajak tersebut diatas, pada da-

65. Dalam arti kompleksitas perundang-undangan diberi pengertian sebagai produk hukum dalam arti luas, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri demikian juga Keputusan Direktorat Jenderal.

66. Bohari, Op.Cit, hal. 25.

67. R. Santoso Brotodiharjo, Op.Cit, hal. 1.

sarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu dengan hukum pajak dimaksudkan agar peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik memiliki legalitas dan bagaimana hubungan antara mereka yang ada di sektor privat dan sektor publik tersebut seharusnya dilakukan. Perbedaan kedua definisi tersebut terletak pada dimasukkan pembidangan hukum pajak, yang secara tegas dimasukkan bagian dari hukum publik (definisi Santoso Brotodihardjo), sedang definisi Bohari menekankan pada sifat hubungannya.

Hukum Pajak (*tax law*) juga disebut hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. 68

Dilihat dari substansinya, hukum pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Material 69.

Hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa saja yang harus dikenakan pajak, besarnya pajak. Dengan demikian di dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai hukum pajak

68. Moh. Zain dan Kustadi Arinta, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Alumni, Bandung, 1989, hal. 95.

69. Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, Perpajakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997, hal. 11-12.

material antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah.

Hukum pajak formal mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan. Termasuk didalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya Surat Ketetapan Pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.

Jadi hukum pajak formal adalah memberikan jaminan, bahwa hukum pajak materiil akan diselenggarakan dengan tepat, termasuk di dalamnya peraturan yang memuat tentang kenaikan, denda serta tata cara pembebanan dan pengembalian pajak.⁷⁰ Yang dapat dikategorikan hukum pajak formal yang berlaku saat ini adalah UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No.19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Agar hukum atau peraturan perundang-undangan dapat benar-benar berfungsi, menurut Soerjono Soekanto ⁷¹, maka harus diperhatikan sedikitnya 4 faktor, yaitu :

70. Mansury R., Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 3 Perubahan Undang-Undang Dalam Tahun 1994, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1996, hal. 20.

71. Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hal. 47.

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

B.4. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak

B.4.1. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*, mengenai "Four Cannons of Taxation", ada 4 (empat) asas-asas pemungutan pajak, yaitu meliputi :

- *Ability to pay (equality of sacrifice)*
- *Certainty*
- *Convenience*
- *Economy*⁷²

(a) *Asas Ability to pay atau equality of sacrifice.*

Bahwa pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan. Pajak memenuhi rasa keadilan apabila Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan yang lebih besar membayar pajak lebih besar daripada Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan yang lebih kecil dan orang yang mempunyai potensi untuk membayar pajak telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

(b) *Asas Certainty*

Bahwa pemungutan pajak harus ada aturan hukum

72. Diaz Priantara, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 3-4.

yang pasti. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat, namun tetap harus berdasarkan undang-undang. Tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa undang-undang. Sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara, maka rakyatlah yang akan menetapkan atau menyetujui pajak-pajak yang boleh dipungut Pemerintah dari mereka. Persetujuan rakyat tersebut direpresentasikan melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepastian dalam hukum pajak menurut **Rimsky K. Judisseno** yaitu mengenai:

- 2.a. Perlindungan hukum berupa jaminan terhadap wajib pajak,
- 2.b. Arti kepastian yang menjadi obyek pajaknya,
- 2.c. Arti kepastian mengenai subyeknya,
- 2.d. Arti kepastian mengenai tata cara pemungutan.⁷³

(c) *Asas Convenience of Payment.*

Bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan saat-saat dan waktu yang tepat yang memungkinkan Wajib Pajak dengan mudah memenuhi kewajibannya. Dengan asas ini ditekankan pula bahwa pelayanan pajak juga harus mudah dan kooperatif sehingga Wajib Pajak merasa senang memenuhi kewajibannya.

73. Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 11.

(d) Asas Economy

Bahwa harus ada efisiensi dalam pemungutan pajak. Biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadminis-
trasikan, mengelola, dan memungut pajak harus
lebih kecil daripada penerimaan pajak. Demikian
pula pengorbanan masyarakat (*public sacrifice*)
yang timbul akibat dari pemungutan pajak harus
lebih kecil daripada manfaat yang dapat dirasakan
masyarakat dari pajak (*public benefit*).

B.4.2. Syarat- Syarat Dalam Pemungutan Pajak

Didalam pemungutan pajak yang diselenggarakan
oleh negara agar tercapainya keadilan dan kepastian
hukum maka harus dapat memenuhi 4 syarat, yaitu :

1. Syarat Keadilan
2. Syarat Yuridis
3. Syarat Ekonomi
4. Syarat Finansial

ad.1. Syarat Keadilan

Dalam mencari keadilan salah satu jalan yang
harus ditempuh adalah mengusahakan supaya pemun-
gutan pajak diselenggarakan secara umum dan
merata.

Syarat keadilan ini meliputi beberapa syarat
yang harus dipenuhi⁷⁴, yaitu :

1. Bahwa pajak harus umum.

74. R.H.A. Rachman Prawiraamidjaja, Keuangan Negara dan
Kebijaksanaan Fiskal, Alumni, Bandung, 1980, hal.51-52.

Artinya bahwa tidak ada satu golongan penduduk dikecualikan dari pajak, kecuali karena alasan-alasan teknis pajak.

2. Bahwa tidak ada orang yang diberi keistimewaan dalam hal pengenaan pajak, orang baik yang berpengaruh besar atau kecil harus dipajaki.
3. Bahwa pajak harus dibagi seadil-adilnya. Artinya kebutuhan harus dibagi jumlah orang yang membayar pajak dengan ketentuan yang seadil-adilnya.

ad.2. Syarat Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik bagi negara maupun untuk wajib pajak. Bagi negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat (2), yang menyatakan bahwa : " Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang ".

Dalam menyusun undang-undang, maka secara umum harus memuat tentang :

- a. Hak-hak negara sebagai pemungut pajak (fiscus) yang harus dijamin terlaksananya dengan lancar.
- b. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum

yang tegas agar supaya tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiscus dan segala aparaturnya.

- c. Adanya jaminan kepastian hukum terhadap tersimpannya rahasia mengenai diri wajib pajak atau perusahaan wajib pajak yang telah disampaikan pada instansi pajak, dan rahasia itu tidak disalah gunakan.⁷⁵

ad.3. Syarat Ekonomi

Kebijakan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat dalam mencapai kebahagiaan.

ad.4. Syarat Financial

Pajak dipungut untuk memasukkan uang ke kas negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. Artinya bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak hendaknya lebih kecil daripada uang yang masuk ke kas negara.

Sistem perpajakan di Indonesia seperti juga di

75. S. Munawir, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal.11.

negara lainnya, telah berkembang sebagai reaksi dari pengaruh ekonomi, politik dan sosial. Agar sistem perpajakan mempunyai struktur pajak yang "baik" dengan bertitik tolak dari pendapat Adam Smith dan ahli-ahli ekonomi lainnya, maka **Musgrave and Musgrave**⁷⁶ berpendapat bahwa pajak harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat.
2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran "sesuai dengan kemampuannya".
3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimalkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

B.5. Teori Pemungutan Pajak

Didalam memahami pengertian "pemungutan pajak" maka menurut Prof. Sindian memberi pengertian bahwa :

" Pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan

76. Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek, Erlangga, Jakarta, 1991, hal.230-231.

yang demikian besarnya yang berada di tangan negara, yang bahkan hukumnya diciptakan oleh negara sendiri justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat, kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan".⁷⁷

Berdasarkan asas keadilan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tindakan negara didalam melakukan pemungutan pajak dapat dibenarkan dengan didukung oleh teori-teori sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.⁷⁸

Jadi menurut teori ini negara dianggap sebagai perusahaan asuransi, oleh karena itu negara bertugas memberi perlindungan hukum dan wajib pajak membayar preminya.⁷⁹

Teori ini sudah ditinggalkan, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misal mati dibunuh, maka negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya asuransi.⁸⁰

b. Teori Kepentingan

Teori ini mengatur besarnya pajak sesuai dengan

77. Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 59.

78. Mardiasmo, op. cit, hal.3.

79. Chidir Ali, Op.cit, hal. 107.

80. Bohari, op.cit, hal.32-33

besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pajak yang harus dibayar.

Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan sifat pajak, karena pajak sifatnya adalah suatu pembayaran yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk, dan menurut teori ini pajak harus sesuai dengan kepentingan masing-masing.

c. Teori Daya Pikul

Bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur gaya pikul seseorang dapat digunakan antara lain : jumlah penghasilan, kekayaan, belanja atau pengeluaran, dan jumlah keluarga.

Teori daya pikul ini menurut W.J de Langen, bahwa daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, .f#82 setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan yang primer (biaya hidup yang sangat mendasar).⁸¹

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat

81. Bohari, *ibid*, hal.33.

untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkanannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu. Bahwa dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak; bukan kepentingan individu, dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.⁸²

B.6. Fungsi Pajak

Pajak sebagai pungutan negara kepada rakyatnya, pada dasarnya mempunyai 2 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgeter
2. Fungsi Regulasi

ad.1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak disini merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

ad.2. Fungsi Regulasi (Fungsi Mengatur)

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

- a. sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial;

82. Bohari, Ibid, hal. 33.

- b. sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.⁸³

Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomis, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi.⁸⁴

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur :

- a. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
- b. Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
- c. Pengenaan pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah.⁸⁵

Menurut Miyasto pajak memiliki tiga fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Budgeter, sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangu-

83. Slamet Munawair, Perpajakan untuk SLTA, BPFE, Yogyakarta, 1990.

84. Miyasto, op.cit, hal.6.

85. Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Hasain, op.cit, hal.6.

nan,

2. Fungsi Regulasi, berperan untuk mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan konsumsi,
3. Fungsi Stabilisasi, alat kebijaksanaan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.⁸⁶

B.7. Jenis-jenis pajak

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis pajak, yang dibagi kedalam golongan-golongan besar. Sehingga penggolongan pajak dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pembagian menurut cara pemungutannya terdiri dari :

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak seorang pengusaha dibayarnya dari bagian pendapatan atau labanya sendiri.⁸⁷

Pajak ini dapat dipungut secara periodik (berkala) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau kohir (tindakan Surat Ketetapan Pajak)

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu suatu pajak yang

86. Miyasto, Segi-segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, diselenggarakan oleh FH. UNDIP, Semarang, 25 September 1995, hal.9.

87. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal.3.

bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

Pajak ini dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang, pembuatan akte.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai,

Bea Balik Nama

b. Pembagian menurut sifatnya, pajak dibagi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subyektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Maka dapat terjadi pada pemungutan pajak terhadap orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama tetapi penghasilan yang dipungut tidak sama. Hal ini disebabkan keadaan diri wajib pajak tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajaknya (PTKP). Misalnya dalam PPh antara orang yang kawin dan mempunyai anak dengan yang tidak kawin dengan penghasilan yang sama maka tarif pajaknya akan berbeda.

- 2) Pajak Obyektif atau pajak yang bersifat kebendaan, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya saja tidak memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya (orang pribadi atau

badan, warga negara atau tidak).⁸⁸

Contohnya : Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan memungut) yang terdiri dari :

1) Pajak Negara atau Pusat

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen pajak :

- Pajak Penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan

b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2) Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Pajak Daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah

88. Tulis S. Meliala, Perpajakan Dalam Teori Dan Praktek, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991, hal.24-25.

Tingkat II.

Jenis Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Jenis Pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.⁸⁹

C. PAJAK PENGHASILAN (PPh)

C.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sebagaimana diatur menurut pasal 1 UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan sebelum adanya perubahan perundang-undangan perpajakan nasional tahun 1983, diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan/ordonansi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan Orang Pribadi yang

⁸⁹. Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab Pajak Penghasilan, Harvarindo, Jakarta, 2000, hal. 4-5.

dipungut berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944 dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 serta pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti yang diatur dalam undang-undang pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti tahun 1970.⁹⁰

Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1984. Yang kemudian mengalami perkembangan dan perubahan dengan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan. Yang terakhir mengalami perubahan dengan adanya reformasi perpajakan tahun 2000 yaitu dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

Menurut Rimsky K. Judisseno, Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

C.2. Pengertian Penghasilan

Undang-undang pajak yang lama, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, menggunakan istilah **pendapatan**; undang-undang pajak yang baru tahun 1983 menggunakan istilah **penghasi-**

⁹⁰. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hal. 42.

lan. Dalam penggunaan sehari-hari kedua istilah tersebut diartikan sama.⁹¹

Dalam UU perpajakan pengertian **Penghasilan** adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan demikian definisi penghasilan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis;
- (2) Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak;
- (3) Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia;
- (4) Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁹²

Pengertian yang dianut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pengertian ekonomis, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seseorang atau suatu badan. Dengan demikian pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas.
Penghasilan dari hubungan kerja misalnya penghasilan

91. Moenaf H. Regar, Pajak Penghasilan 1994 (Suatu Catatan Dan Interpretasi Dan Catatan), Erlangga, Jakarta, 1995, hal.18.

92. Mansury R., Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 2. tentang apa yang menyebabkan subyek pajak dikenakan pajak, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995, hal.26.

yang diterima subyek pajak yang bekerja pada pemberi kerja, seperti karyawan suatu perusahaan, guru suatu sekolah dsb. Sedangkan penghasilan atas pekerjaan bebas yang tidak berkaitan dengan pemberi kerja tertentu tetapi pekerjaan karena profesinya yaitu : dokter, pengacara, dll.

2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana perusahaan. Penghasilan ini dapat berupa laba atau sisa hasil usaha. Diperoleh karena usaha perseorangan, perseroan, koperasi, dll.
3. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan dari harta gerak, harta tidak bergerak, dan harta yang dikerjakan sendiri. Penghasilan ini adalah penghasilan yang diperoleh karena seseorang atau badan hukum menanamkan modalnya sehingga memperoleh penghasilan berupa bunga dari deposito dan tabungan atau surat berharga lain, penghasilan berupa pembagian laba suatu perusahaan baik berupa dividen maupun bentuk lainnya.
4. Penghasilan lain-lain, misalnya berupa hadiah undian, penghasilan karena pembebasan utang dan penghasilan lain.⁹³

C.2. Obyek Pajak Penghasilan

Obyek pajak artinya apa yang dikenakan pajak. Didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah obyek pajak.⁹⁴

Yang termasuk Obyek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu meliputi :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang .

93. Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 157.

94. Moenaf H. Regar, Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntansi Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 27.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya dan bagi anggotanya;
- p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Yang termasuk di dalam obyek Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat 1 UU PPh, pada huruf a sampai dengan p diatas, apabila ditinjau dari segi perancangan UU, merupakan ketentuan enunsiatif (tanpa batas) atau terlalu luas. Artinya apa yang tidak tersebut dalam huruf a sampai dengan p, sepanjang memenuhi rumusan penghasilan dapat dijadikan obyek PPh. Hal ini tampak dalam kata "termasuk".

Menurut Rochmat Soemitro, suatu ketentuan hukum publik seharusnya merupakan ketetapan yang limitatif (terbatas) sehingga tidak dapat ditafsirkan lain selain yang ditafsirkan UU. Kata "termasuk" memungkinkan aparat pajak (fiskus) sebagai pelaksana Undang-Undang Pajak

menafsirkan secara analogi, apa saja bisa termasuk obyek pajak.⁹⁵

Tidak termasuk Obyek Pajak menurut pasal 4 ayat (3) UU PPh adalah :

- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

95. Rocmat Soemitro, op.cit. 1992, hal. 22-25.

asuransi bea siswa;

- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen, kepemilikan saham pada badan yang dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan

modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

C.3. Subyek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subyek pajak yang menerima penghasilan disebut Wajib Pajak.

Subyek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.⁹⁶

Yang termasuk Subyek Pajak Penghasilan (Pasal 2 ayat (1) UU PPh, adalah :

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau diluar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan

96. Moenaf H. Regar, Op. cit. hal.8

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya.

d. Bentuk usaha tetap.⁹⁷

Subyek pajak ini terdiri dari subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

Yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat (3) UU PPh adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud subyek pajak luar negeri menurut Pasal 2 ayat (4) UU PPh, adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

97. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hal. 35-36.

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedang saat bermula dan berakhirnya kewajiban pajak bagi subyek pajak, yaitu pada saat :

1. Bagi orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. (Pasal 2A ayat(1) UU PPh).
2. Bagi wajib pajak badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 2A ayat(2) UU PPh)
3. Warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan. (Pasal 2A ayat(5) UU PPh).

Pembagian subyek pajak diperlukan karena Undang-undang memperlakukan pengenaan beban pajak yang berlainan untuk masing-masing subyek pajak.

Tidak semua subyek pajak menjadi Wajib Pajak, subyek pajak yang tidak mempunyai penghasilan ataupun mempunyai penghasilan yang tidak menjadi obyek pajak, bukan Wajib Pajak. Seorang karyawan yang memperoleh penghasilan diba-

wah batas penghasilan tidak kena pajak atau memperoleh sumbangan tertentu, bukan wajib pajak.⁹⁸

C.4. Tarif Pajak Penghasilan

Pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari keadilan dan pemerataan, sehingga seluruh wajib pajak akan merasakan tekanan yang sama dalam pembayarannya. Dengan demikian tarif pajak yang berlaku harus mencerminkan keadilan. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.

Ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif pajak proporsional

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang tetap, berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Jumlah pajak selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif pemungutan pajak dengan jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Degresif

Tarif pemungutan pajak dengan presentasi yang semakin kecil dengan semakin besar jumlah yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajak.

⁹⁸. Moenaf H. Regar, Pajak Penghasilan 1994, Suatu Interpretasi dan Catatan, Hal. 10.

4. Tarif Progresif

Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.⁹⁹

Dengan adanya reformasi perpajakan tahun 2000, maka mulai 1 Januari tahun 2001 tarif Pajak Penghasilan mengalami perubahan yaitu berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Adanya perubahan yang mendasar yaitu tarif yang berbeda antara Wajib Pajak Orang Pribadi/Perseorangan dan Wajib Pajak Badan. Diatur dalam Pasal 17 UU PPh

a. Wajib Pajak Orang Pribadi/Perorangan Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
- 0 Sampai dengan Rp. 25.000.000	5 %
- Diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	10 %
- Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	15 %
- Diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000	25 %
- Diatas Rp. 200.000.000	35 %

b. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
- Sampai dengan Rp. 50.000.000	10 %
- Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	15 %
- Diatas Rp. 100.000.000	30 %

Maksud dengan adanya perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Badan adalah untuk dapat lebih

⁹⁹. Mardiasmo, op.cit. hal.10-11.

memberikan keadilan dan pemerataan beban PPh kepada masyarakat Wajib Pajak.

C.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Meskipun sudah ada penghasilan tidak termasuk sebagai obyek pajak, tetapi masih ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila dalam satu tahun pajak, PTKP mengalami kenaikan maka hal ini akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan (dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dalam kondisi tetap).

Pada orang pribadi atau perseorangan, sebagai wajib pajak dalam negeri diberi pengurangan berupa PTKP. Penghasilan bersih Wajib Pajak Perseorangan setelah dikurangi dengan PTKP merupakan penghasilan kena pajak.¹⁰⁰ Disamping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberi tambahan PTKP. Bagi wajib pajak yang isterinya menerima penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka wajib pajak tersebut mendapat tambahan PTKP untuk seorang isterinya. Wajib Pajak yang mempunyai anggota sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya diberikan tambahan PTKP maksimal tiga orang.¹⁰¹

Wajib Pajak perseorangan diberi pengurangan atas penghasilannya yang berupa PTKP dengan maksud adanya dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan dalam

100. YB. Sigit Utomo, Pajak Penghasilan, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995, hal. 43.

101. Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan 1994 Dan Penjelasannya, Pustaka Tiara Mas, Surabaya, 1996, hal. 168-169.

menerima atau memperoleh penghasilan.

Dengan adanya reformasi perpajakan tahun 2000, PTKP diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini adalah :

- a. Rp. 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak sendiri.
- b. Rp. 1.440.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal tiga orang).

PTKP tersebut sebelumnya telah diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK 04/1998 tanggal 27 Juli tentang Faktor Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan jumlah yang sama, yang kemudian dikuatkan dalam UU yaitu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam hal karyawan tidak kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan diberikan tambahan PTKP sebesar

Rp. 1.440.000,00 dan ditambah PTKP untuk keluarganya.¹⁰²

D. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

d.1. Pengertian Orang Pribadi atau Perorangan

Telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa Orang Pribadi atau lebih dikenal dengan istilah Perorangan adalah termasuk salah satu dari Subyek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Perorangan berkaitan dengan orang secara pribadi.¹⁰³

Sedangkan menurut Kansil, di dalam hukum perkataan "orang" atau "persoon" berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum.¹⁰⁴ Subyek hukum ada dua yaitu manusia dan badan hukum. Dalam hal ini berlakunya manusia sebagai (pembawa hak) subyek hukum yaitu mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap UU, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum oleh UU.

d.2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Didalam Pajak Penghasilan, Orang Pribadi atau

102. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999, hal. 15.

103. Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit. hal.706

104. Kansil, Op.cit, hal. 215.

Perorangan adalah sebagai salah satu dari subyek pajak penghasilan selain badan usaha dan bentuk usaha tetap (pasal 2 ayat (1) UU PPh).

Pengertian Perorangan atau Orang Pribadi sebagai subyek pajak, dalam PPh adalah

Orang Pribadi yang dilahirkan dan bertempat tinggal di Indonesia atau orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan disebut sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri. Sedangkan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia disebut Wajib Pajak Luar Negeri.¹⁰⁵

Didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemungutan pajak orang pribadi diatur didalam pasal 21 ayat (1) UU 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

"Bahwa Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain

105. Bambang Suranto dan Mulyadi.PS, Pengetahuan Praktis Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 19.

- dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak Orang Pribadi atau Perorangan dapat dibedakan, meliputi

:

1. Penghasilan dari usaha/menjalankan usaha. Perhitungan PPh-nya boleh memilih Norma atau Pembukuan.
2. Penghasilan dari pekerjaan (sebagai karyawan).
3. Penghasilan dari pekerjaan bebas (seperti: dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek dan sebagainya).
4. Penghasilan dari modal yang berupa : bunga, dividen, sewa, dan royalti.
5. Penghasilan lain-lain seperti : hadiah, keuntungan karena pembebasan utang dan sebagainya.¹⁰⁶

106. Agus Sambodo, op. cit. hal.162.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang menjadi fokus penelitian peneliti. Garis besar penyajian data dan analisis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan upaya mengatasinya di Kota Semarang dan upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebagaimana yang diamanatkan dalam reformasi perpajakan.

3.1. PELAKSANAAN SISTEM *SELF ASSESSMENT* DI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Maka sejak tanggal 1 Januari tahun 1984 berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan bersamaan dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mulai berlakunya Pajak Penghasilan yang baru, menggantikan pemungutan Pajak Penghasilan sistem yang lama yaitu :

a. Ordonantie Pajak Perseroan tahun 1925 (Staatsblad Tahun

1925 No. 319) sebagaimana UU No. 8 tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 43, Tambahan Lembaran Negara No. 2940).

- b. Ordonantie Pajak Pendapatan 1944 (Staatblad Tahun 1944 No. 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun. 1970 No. 44, tambahan Lembar Negara No. 2941).
- c. UU No. 8 tahun 1967 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan Tahun 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 18, Tambahan Lembar Negara No. 2827); kecuali ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak kekayaan.
- d. UU No. 10 Tahun 1970 Tentang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 45, Tambahan Lembar Negara No. 2942).¹⁰⁷

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan pajak diatas, masing-masing undang-undang mengatur tidak saja tentang ketentuan hukum pajak materiil saja, namun juga mengatur tentang ketentuan hukum pajak formalnya (Tata Cara Perpajakan). Adanya berbagai macam UU sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan pada saat itu belum adanya satu kesatuan didalam pengaturan tata cara perpajakannya khususnya Pajak Penghasilan. Sehingga dengan tidak adanya kesatuan dalam

107. Sudarsono, Aturan Bea Meterai dan Kebijakan Pajak, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 5.

peraturan perpajakan tentunya akan dapat membingungkan dan menyulitkan Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban pajaknya, bahkan dapat menimbulkan adanya pajak berganda.

Dari paparan tersebut diatas, maka dengan adanya UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP dan UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh bermaksud untuk menyederhanakan berbagai peraturan pajak sebelumnya yang berlaku, karena pajak-pajak tersebut dirasakan menimbulkan adanya pajak berganda.

Karena keadaan tersebut maka pemerintah melakukan **Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN)**I pada akhir tahun 1983 atau lebih dikenal dengan *Tax Reform*, yaitu menyatukan Tata Cara Perpajakan dalam satu UU melalui UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP dan juga pada Pajak Penghasilan melalui UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh. Maka dengan adanya UU ini, ketentuan-ketentuan perpajakan sebelumnya sebagaimana tersebut diatas dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Salah satu perubahan yang sangat penting dalam pembaharuan perpajakan tersebut adalah diterapkannya **Sistem *Self Assessment*** dalam pemungutan pajak, yang menggantikan **Sistem *Official Assessment***.

Sistem perpajakan yang diterapkan pada undang-undang perpajakan sebelum adanya *tax reform* I tahun 1983 menggunakan **Sistem *Official Assessment***.

Menurut **Sistem *Official Assessment***, petugas pajak (*fiskus*)¹⁰⁸ secara aktif melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Dalam hal ini besarnya

108. Yang dimaksud dengan *fiskus* adalah keseluruhan aparat perpajakan yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

pajak terutang ditentukan oleh petugas pajak sesuai dengan data dan informasi dari wajib pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berisi besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Dengan demikian SKP dalam hal ini berfungsi untuk :

- a. menimbulkan adanya hutang pajak;
- b. menentukan besarnya hutang pajak;
- c. memberitahukan besarnya hutang pajak kepada Wajib Pajak.¹⁰⁹

Dalam pelaksanaannya *Sistem Official Assessment* ini perkembangannya dimasyarakat, telah bergeser menjadi *Semi Self Assessment* yaitu dengan diundang-undangkannya UU No. 8 tahun 1967 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan Tahun 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 mengatur tentang cara pungutan pajak melalui MPS (*Menghitung Pajak Sendiri*) dan MPO (*Menghitung Pajak Orang Lain*). Dengan cara pemungutan bahwa setiap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam tahun berjalan dapat menghitung, menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri dikenal dengan MPS (*Membayar Pajak Sendiri*) seperti *Self Assessment*. Sedangkan setelah berakhirnya tahun pajak (tahun takwim) Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya dengan mengisi SPT (*Surat Pemberitahuan*) yang diterima dari Inspeksi Pajak (sebelum diganti dengan nama Kantor Pelayanan Pajak), kemudian menyampaikannya kembali pada Kantor Inspeksi Pajak dan membayar pajaknya bila telah

109. S. Munawir, op.cit, hal. 19.

memperoleh SKP (Surat Ketetapan Pajak)¹¹⁰, hal ini menunjukkan adanya Sistem *Official Assessment*. Dengan demikian adanya UU No. 8 Tahun 1967 tentang MPS dan MPO sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tata cara pemungutan Pajak Pendapatan, Perseroan dan Pajak kekayaan "dalam tahun pajak berjalan" menerapkan Sistem *Self Assessment*, dan pada akhir tahun pajak menerapkan Sistem *Official Assesment*. Jadi secara keseluruhan pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan, dan Pajak Kekayaan sebelum tahun 1983 menerapkan Sistem *Semi Self Assessment*.

Dari penjelasan tersebut diatas, menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sebelum reformasi perpajakan tahun 1983 tersebut, masih bersifat tambal sulam saja, belum ada perubahan yang mendasar. Menurut penulis perundang-undangan tersebut diatas, yang sebagian besar merupakan warisan kolonial bertujuan semata-mata dibuat hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah tanpa memperhatikan rasa keadilan bagi rakyat sebagai wajib pajak. Sehingga ciri dan corak sistem perpajakan sebelum reformasi perpajakan 1983 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, seperti tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhan menjadi wewenang pemerintah.
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam banyak hal sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan *fiskus*.¹¹¹ Hal ini mengaki-

110. B. Boediono, *Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan I*, Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, Jakarta, 1994, hal.1.4.

111. Yang dimaksud dengan fiskus adalah keseluruhan aparat perpajakan yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

batkan kurang mendapat pembinaan dan bimbingan terhadap kewajiban perpajakannya dan kurang berperan serta dalam memikul beban negara mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.¹¹²

Menyadari adanya kelemahan dari undang-undang perpajakan tersebut diatas, maka pemerintah berusaha untuk melakukan penyempurnaan yaitu dengan melakukan **Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN)** pada akhir tahun 1983 atau lebih dikenal dengan *Tax Reform*¹¹³ yaitu berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara menggantikan migas serta menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional.

PSPN tahun 1983 terwujud dalam bentuk UU Perpajakan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 sebagai berikut :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH);
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah (PPNBM);
4. Tahun 1985 dilanjutkan lagi dengan perubahan terhadap Pajak Hasil Bumi UU No. 1 Tahun 1961 (Prp No. 11

112. Moh. Zain dan Kustadi Arinta, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Alumni Bandung, 1989, hal. 21.

113. Tax Reform bukan merupakan perubahan pajak biasa seperti lazimnya terjadi, melainkan merupakan perubahan yang mendasar mengenai falsafahnya, penetapannya, sistem pemungutannya, sanksinya, kepastian hukumnya, kemudahannya., Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1988, hal. 15.

Tahun 1959, menjadi UU No. 12 / Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

5. UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Maka dengan diberlakukannya UU tersebut diatas, telah mencabut dan tidak diberlakukan UU perpajakan sebelumnya sehingga tidak berlakunya lagi *Sistem Official Assessment*. Perubahan ini sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan dalam masyarakat sebagai pihak yang menompang keberhasilan pemungutan pajak.

Sistem Self Assessment adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.¹¹⁴ Seperti yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Kepercayaan terhadap wajib pajak tersebut merupakan kebijaksanaan dan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah dalam arti luas untuk turut sertanya wajib pajak dalam pembangunan nasional.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak (*fiskus*) tidak turut campur tangan didalam penentuan besarnya pajak yang terutang. *Fiskus* bersikap pasif yaitu berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak.

114. Soeparman, *Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 2.

Diharapkan dari sistem ini pemungutan pajak dapat dilaksanakan lebih sederhana, adil dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak serta dapat lebih memberikan kepastian hukum. Dengan demikian akan dapat menambah jumlah wajib pajak, yang tentunya dapat menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara.

Sistem *Self Assessment* ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 yaitu dengan berlakunya UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP.

Reformasi perpajakan tahun 1983 ini, telah melakukan perombakan yang mendasar terhadap perundang-undangan perpajakan, sehingga ciri dan coraknya perundang-undangan perpajakan setelah *tax reform* 1983 ini, berbeda dari sebelumnya yaitu:

- a. sederhana, baik dalam jumlah jenis pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya;
- b. mencerminkan tercapainya tujuan pemerataan dalam penggunaan dan pembebanannya;
- c. memberikan asas keadilan dan kepastian hukum, baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak;
- d. menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang;
- e. memberikan kepercayaan yang besar pada Wajib Pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyeter sendiri kewajiban pajaknya (*self assessment*);
- f. mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis.¹¹⁵

Perubahan *Sistem Self Assessment* pada tahun 1984 ini terlihat di dalam penjelasan umum UU KUP angka 3 huruf c mengenai ciri dan corak tersendiri dalam sistem pemungutan pajak, yaitu :

115. Agustini Asikin, Tika Noorjaya dan Yulia Himawan, Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya, (Pokok-Pokok Pemikiran Salamun A.T), Bina Rana Pariwisata, Jakarta, 1993, hal. 58.

- c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Sebagai upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, maka pada tahun 2000 dilakukan perubahan kembali terhadap UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000 (selanjutnya dikenal dengan UU KUP). UU no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 (UU PPh).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 sub tentang pengertian pajak, bahwa pajak sebenarnya adalah utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbintenis*).¹¹⁶

Utang pajak timbul karena Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, utang pajak termasuk suatu perikatan yang menyebutkan bahwa :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu "

Sehingga dalam hal ini, dalam perikatan utang pajak akan menimbulkan adanya Hak dan Kewajiban bagi para

116. Rochmat Soemitro, Op. cit, tahun 1992, hal. 1.

pihak yaitu baik bagi Wajib Pajak maupun *fiskus* (aparatur pajak).

Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP meliputi :

- a. Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Pasal 2 ayat (1) UU KUP.
- b. Mengambil Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya. (Pasal 3 ayat (2) UU KUP.
- c. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani SPT. (Pasal 4 ayat (1) dan mengembalikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Melakukan pelunasan dan pembayaran pajak yang dihitung sendiri atau yang ditentukan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. (Pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) UU KUP.
- e. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12 UU KUP).
- f. Menyelenggarakan pembukuan didalam melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebasnya (Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP).
- g. Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang diperlukan oleh petugas pajak (Pasal 29 ayat (3) UU KUP>

Hak Wajib Pajak dalam UU KUP, meliputi :

- a. Menerima tanda bukti pemasukan SPT (Pasal 6 ayat (1) UU KUP).

- b. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT (Pasal 3 ayat (4) UU KUP).
- c. Melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan (Pasal 8 ayat (1) UU KUP).
- d. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 9 ayat (4) UU KUP).
- e. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. (Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (2) UU KUP).
- f. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP. (Pasal 16 ayat (1) UU KUP).
- g. Mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 27 (1) UU KUP).
- h. Memberi kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik Orang Pribadi atau Badan (Pasal 32 ayat (3) UU KUP).
- i. Menerima restitusi/kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) UU KUP).

Kewajiban Fiskus, meliputi:

- a. Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (pasal 11 ayat (2) UU KUP).
- b. Menggunakan uang hasil pajak untuk pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan tujuan undang-undang (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945).
- c. Memberikan putusan atas keberatan atau banding

yang diajukan oleh Wajib Pajak (Pasal 25 ayat (6) UU KUP).

Hak-Hak Fiskus, meliputi :

- a. Mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP).
- b. Memeriksa pembukuan dan data-data lainnya untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 29 ayat (1) UU KUP).
- c. Mengeluarkan Surat Paksa, Surat-Surat lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak (Pasal 21 (5) UU KUP)

Pajak juga diatur di dalam pasal 1233 KUH Perdata, yang menunjukkan bahwa perikatan dapat timbul karena:

- a. Persetujuan atau perjanjian
- b. Undang-Undang

Menurut pasal 1352 KUHPerdata, bahwa : "Perikatan-Perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang timbul dari UU saja atau dari UU sebagai akibat perbuatan manusia. Sehingga dalam hal ini pajak timbul karena UU :

- Diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan : " Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang ".
- Seseorang atau badan baru timbul adanya hutang pajak, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Pajak.

Maka dengan demikian UU yang mengatur tentang

pemungutan pajak sejak adanya reformasi perpajakan I tahun 1983 adalah Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak (UU KUP).

UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP tersebut kemudian mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan UU No.9 tahun 1994 dan terakhir dengan perubahan UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Dalam penyebutan seterusnya UU No. 16 tahun 2000 tentang KUP). Walaupun telah mengalami perubahan perundang-undangan sampai 3 kali, pada dasarnya Sistem *Self Assessment* ini tetap dipertahankan berlakunya sampai sekarang.

UU no. 16 tahun 2000 tentang KUP, terdapat beberapa pasal yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak menggunakan *Sistem Self Asessment*, yaitu :

A. Menunjukkan Wajib Pajak melaporkan sendiri obyek pajaknya :

1. Pasal 2 ayat (1) UU KUP, tentang Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak.

Bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukannya kemudian diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)."

Sedangkan didalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU KUP, dipertegas lagi bahwa semua Wajib Pajak berdasarkan *Sistem Self Assessment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP.

2. Pasal 3 ayat (2) UU KUP tentang Mengambil Sendiri SPT.

Bahwa Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".

3. Pasal 4 ayat (1) UU KUP , yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

4. Pasal 8 ayat (1) UU KUP tentang *kemauan sendiri* membetulkan SPT yang telah disampaikannya dengan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Pada rumusan tersebut menunjukkan bahwa walaupun SPT telah diserahkan kepada fiskus Wajib Pajak masih mempunyai kesempatan dengan kemauan sendiri untuk membetulkan SPT-nya, selama belum dilakukan pemeriksaan.

Pada ayat (4) menyatakan bahwa sekalipun jangka waktu pembetulan SPT sebagaimana ayat (1) telah berakhir, dan fiskus belum menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) Wajib Pajak dengan "*kesadaran sendiri*" mengungkapkannya dalam laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian SPT yang telah disampaikannya, yang mengakibatkan :

- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau

- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
- c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
- d. jumlah modal menjadi lebih besar.

b. Menunjukkan bahwa Wajib pajak **menghitung sendiri** pajak terutangnya, yaitu :

1. Pasal 12 ayat (2) tentang Membayar Pajak tanpa menunggu SKP (Surat Ketetapan Pajak)

Ayat (2) bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Didalam penjelasan pasal 12 ayat (2) UU KUP, menyatakan bahwa Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam SPT, kepadanya tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak ataupun Surat Keputusan dari administrasi pajak.

c) Menunjukkan bahwa Wajib Pajak **Membayar sendiri** pajaknya, yaitu :

1. Penjelasan pasal 12 ayat (1) UU KUP

Dari rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa *Sistem Self Assessment* Wajib Pajak yang diatur didalam penjelasan pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri

oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang harus berperan aktif membayar *pajaknya sendiri*, tanpa harus menunggu adanya SKP dari fiskus.

Selain pasal-pasal yang terdapat pada UU KUP tersebut diatas, dalam UU PPh terdapat juga beberapa pasal yang menunjukkan adanya *Sistem Self Assessment* di dalam pemungutan pajak, yaitu

a. Pasal 20 ayat (1) UU PPh

Bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Sendiri.

b. Pasal 25 ayat (1) dan ayat 2 UU PPh

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan Pajak Penghasilan yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang potong atau dipungut pada pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, sama besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Pasal ini, menunjukkan bahwa Wajib Pajak PPh yang harus membayar sendiri pajaknya tanpa melalui pihak lain.

Berdasarkan pada rumusan-rumusan pasal-pasal tersebut sebagaimana diatas, menunjukkan dalam UU KUP dan UU PPh menghendaki adanya *Sistem Full Self Assessment* (*self assessment* secara murni) di dalam pemungutan perpajakan di Indonesia. Sistem ini menghendaki adanya peran aktif Wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya untuk menghitung, membayar dan menyetor sendiri pajaknya.

Kebijakan Sistem *Self Assessment* ini, mempunyai tujuan , yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran pajak (*tax conciousness*) dari wajib pajak guna mengetahui dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Adanya hasrat dan minat yang tinggi (*tax mindedness*) wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- 3) Adanya kepatuhan membayar pajak (*tax compliance/tax obidience*) dan adanya disiplin dalam melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya .
- 4) Adanya kejujuran wajib pajak (*honesty*) yaitu kejujuran wajib pajak dalam mengisi dan membayar angsuran pajak mengisi SPT Tahunan sesuai dengan keadaan.
- 5) Terhindar dari timbulnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak yang terhutang.¹¹⁷

Kepercayaan penuh yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam *Sistem Self Assessmet*, maka diharapkan WP berperan serta dan aktif terhadap administrasi perpajakan.

117. Imam Wahyu Utomo, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994, hal. 12.

Peran serta Wajib Pajak berupa :

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkannya dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Pajak dalam wilayah WP bertempat tinggal atau berkedudukan.

Sistem Self Assessment pada Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 April tahun 1984 yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh. UU PPh ini telah beberapa kali mengalami perubahan-perubahan dengan adanya reformasi perpajakan yaitu dengan melalui UU No. 7 tahun 1991 kemudian dirubah lagi dengan UU No. 10 tahun 1994 dan yang terakhir ini yaitu adanya reformasi perpajakan tahun 2000 yang disahkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2000 dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang PPh dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari Tahun 2001. Walaupun telah beberapa kali perubahan dan penyempurnaan perundang-undangnya, pada prinsipnya sistem *Self Assessment* ini tetap dipertahankan.

Hal ini disesuaikan dengan perkembangan yang berkembang di masyarakat dan adanya perkembangan ekonomi global yang pesat.

Ditunjukan pada penjelasan umum angka 3 dan angka 4 huruf b UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang menganut *Sistem Self Assessment*, yaitu :

- (3) Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan *Sistem Self Assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :
- a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
 - b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
 - c. menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dari daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
- (4)b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, *Sistem Self Assessment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki.

Dengan mencermati pernyataan diatas, menunjukkan bahwa sistem *Self Assessment* masih cocok untuk di implementasikan pada pemungutan Pajak Penghasilan sampai sekarang.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif¹¹⁸ yang kewajiban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada subyek pajak lain,¹¹⁹ dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak.

Di dalam UU PPh, dalam pasal 2 ayat (1) bahwa yang menjadi subyek pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi (perorangan)
- 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

118. Pajak Subyektif adalah jumlah pembayaran pajak yang besar kecilnya tergantung pada status dan keadaan Wajib Pajaknya (subyek pajak).

119. Rimsky K. Judisseno. op.cit. hal.79.

- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa penelitian ini lebih menekankan untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan *Sistem Self Assessment* pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Pajak Penghasilan Perorangan.

Wajib Pajak yang dikenakan PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, baik yang berasal dari dalam negara maupun luar negara.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan lain dari modal.
- c. Karyawan/karyawati yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan/atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lebih dari satu pemberi kerja.
- d. Kuasa warisan yang belum terbagi.
- e. Pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan pegawai BUMN/BUMD.
- f. Warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing.
- g. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang

berda dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

h. Masing-masing suami isteri yang dikenakan Pajak Penghasilan secara terpisah dalam hal :

- suami-isteri telah hidup berpisah;
- dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 120

Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui *Sistem Self Assessment* pada pemungutan PPh Orang Pribadi (OP), maka dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

1. Pendaftaran Diri sebagai Wajib Pajak PPh Orang Pribadi

Pendaftaran sebagai Wajib Pajak diatur dalam Pasal 2 UU KUP, yaitu :

" Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dan kepadanya diberi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP ini berfungsi :

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

120. Buku petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, hal. 2.

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 121

Saat ini untuk memiliki NPWP, khususnya untuk WP PPh OP, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang disediakan kantor pajak.
2. menyerahkan fotocopi KTP/SIM/Paspor.
3. menyerahkan fotocopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
4. Menyerahkan Surat Kuasa (apabila dikuasakan kepada orang lain).

Maka setelah memenuhi semua persyaratan tersebut dan diserahkan pada Seksi Tata Usaha Perpajakan. Selama kurang lebih satu hari, Wajib Pajak akan menerima Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan Kartu NPWP.

Adanya kewajiban pendaftaran disamping dalam upaya menjamin kepastian hukum dan keadilan, juga secara khusus dimaksudkan untuk mencapai kemandirian bangsa dalam pembiayaan dan pembangunan negara sehingga diperlukan peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat UU (*tatbestand*) wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Apabila tidak mendaftarkan diri, menurut pasal 2 ayat 4 UU KUP akan diterbitkan NPWP Secara Jabatan, yang berbunyi:

121. Waluyo dan Wirawan, Op. cit, hal.18.

"Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Poko Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya".

Pemberian NPWP secara jabatan diatur melalui perubahan pertama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 1994 (Pasal 2 ayat 4), selanjutnya dipertegas, sehingga lebih memiliki daya paksa terhadap calon wajib pajak, yaitu melalui UU No. 16 tahun 2000 tentang KUP, dimana semula berbunyi "dapat" diterbitkan NPWP secara jabatan, diubah dengan **menghilangkan** kata "dapat" sehingga berbunyi diterbitkan NPWP secara jabatan.

Substansi kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh kebijaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah sebagai upaya meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar untuk meningkatkan pendapatan negara.

Dengan dihilangkan kata "dapat" dalam pasal 2 ayat 4 UU No. 16 Tahun 2000 tersebut, maka penerbitan NPWP secara jabatan yang semula kaidah hukumnya yang bersifat *fakultatif* menjadi kaidah hukum yang bersifat *imperatif* atau memaksa (*dwingen recht*), sehingga harus ditaati atau tidak dapat dikesampingkan. Ayat dan pasal tersebut menjadi landasan dalam melakukan "law enforcement" bagi Wajib Pajak yang tidak taat atau sebagai upaya preventif terhadap Wajib Pajak yang belum taat. Sehingga dengan membenarkan tindakan paksa tersebut tentu hal ini **bertentangan** dengan prinsip "*self assessment*" yang dianut pajak penghasilan. Sehingga *fiscus* tidak dibenarkan melakukan pertimbangan apapun sepanjang calon Wajib Pajak dalam

pemeriksaan menunjukkan pendapatannya diatas PKP, maka harus diterbitkan NPWP.

2. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Tahap selanjutnya dalam *Sistem Self Assessment* yaitu wajib pajak dalam menghitung besarnya hutang pajak yang harus dibayar sendiri dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan besarnya hutang pajak.

Mekanisme yang dijalankan untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah melalui Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Bulanan maupun SPT Tahunan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 UU No. 16 tahun 2000 , Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan SPT, pembayaran pajak tidak tergantung adanya surat tagihan atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tetapi WP menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan jalan mengisi dan menyampaikan SPT kepada Dirjen Pajak atau pada Kantor Pelayanan Pajak Setempat.

Adapun prosedur dalam penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

1. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan menunjukan NPWP.

Walaupun dalam UU Perpajakan kita menganut *Sistem Self Assessment*, ternyata di lapangan berdasarkan penelitian penulis di Kantor Pelayanan

Pajak di Kota Semarang, bahwa formulir SPT selama ini lebih banyak yang dikirim ke alamat Wajib Pajak, dan hanya sedikit Wajib Pajak yang mengambil sendiri Ke Kantor Pelayanan Pajak.

Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) UU KUP, yang menyatakan :

" Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Dengan dikirimnya SPT ke alamat Wajib pajak ini, menurut penulis menunjukkan masih berperan aktifnya *fiscus* (aparatur pajak) dalam pemungutan pajak. Sehingga menunjukkan peran *Official Assessment* masih diterapkan dalam pengiriman SPT. Melihat kenyataan tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan dari *Sistem Self Assessment* yang menghendaki Wajib pajak yang aktif dengan kesadaran sendiri untuk mengambil sendiri SPTnya.

2. Mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU KUP, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Benar, meliputi seluruh obyek pajak yang dimiliki, dalam penghitungan maupun pengisian kolom pada setiap lampiran formulir SPT, dalam penetapan tarif pajak maupun pengkreditan pajak yang telah dibayar/dipungut/dipotong melalui pihak lain.
- b. Jelas, maksudnya bahwa penulisan data didalam

SPT harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi fiskus/peneliti.

c. **Lengkap**, artinya bahwa seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan, juga adanya kelengkapan penanda-tanganan SPT, sebab SPT yang sudah terlanjur disampaikan namun belum ditandatangani maka dianggap tidak lengkap lagi dan dianggap belum memasukkan SPT.

Apabila pengisian formulir SPT tidak benar dan mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar sehingga dapat dikenakan sanksi perpajakan.

3. Menyerahkan kembali SPT ke KPP yang bersangkutan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan. Dalam mengembalikan SPT Wajib Pajak menerima bukti penerimaan yang bertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanggal bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Untuk keperluan pelaporan dan pertanggungjawaban besarnya utang pajak penghasilan OP, bentuk dan jenis SPT yang tersedia ada 2 (dua) macam yaitu :

1. **SPT 1721**, yaitu SPT yang diisi oleh pemotong pajak, biasanya dilakukan oleh bendaharawan yang ditunjuk atau dikukuhkan sebagai pemotong pajak oleh pejabat dari kantor pajak. Bendaharawan bertugas melakukan pemotongan pajak bagi seluruh karyawan di tempatnya bekerja. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksa-

naan penghitungan, pemotongan, pelaporan dan pertanggungjawaban jumlah pajak terhutang.

2. SPT 1770, yaitu SPT yang diisi oleh Wajib Pajak Perseorangan yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dari pekerjaan bebas lainnya.

Sedangkan berdasarkan jenisnya, SPT dapat dibedakan menjadi :

1. SPT Masa (pasal 1 angka 11 UU KUP)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

Untuk Surat Pemberitahuan Masa pada PPh, kelengkapan dokumen yang harus ada adalah :

- Pada PPh pasal 21, 22, 23, 26 berupa :
Surat Setoran Pajak (SSP), bukti pemotongan / Pemungutan Pemungut.
- PPh pasal 25 untuk :
 - a. WP baru (belum mengisi SPT Tahunan) kelengkapannya : SSP bukti pembayaran.
 - b. WP lama (sudah mengisi SPT Tahunan)

2. SPT Tahunan (Pasal 1 angka 12 UU KUP)

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan/melaporkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Dalam proses pelaporan SPT tersebut tersirat pengertian "*self assessment*" dalam perpajakan dan Wajib Pajak dianggap sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar sepanjang tidak ditemukan data lain yang dapat membuktikan ketidak benaran SPT semula.

Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunannya didenda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk SPT Masa didenda Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

3. Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka Wajib Pajak akan melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang melalui SSP (Surat Setoran Pajak). Pasal 1 angka 13 UU KUP, menyatakan :

" Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan".

Tempat pembayaran atau penyetoran pajak yang ditentukan oleh Menteri Keuangan yaitu melalui Bank Persepsi, terdiri dari bank pemerintah dan bank swasta yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Pos dan Giro.

Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak Pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan . Sedangkan untuk pembayaran PPh pasal 25 tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tata cara pembayaran pajak penghasilan Orang Pribadi (OP) pada prinsipnya menggunakan 2 cara, yaitu :

1. Pelunasan dalam tahun berjalan, dilakukan setiap saat diperolehnya penghasilan oleh Wajib Pajak.

2. Pelunasan pada akhir tahun pajak.

ad.1. Pelunasan dalam tahun berjalan, dilakukan pembayaran dengan 2 cara :

(a). Pembayaran pajak melalui pihak lain atau Pihak ketiga (orang lain atau badan baik swasta maupun pemerintah) melalui pemotongan dan pemungutan berdasar pada pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Dikenal dengan istilah **kredit pajak**.

Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berupa potongan pajak atas deviden, bunga, sewa dan royalty.

Pasal 24 yaitu pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 26 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

(b). Pembayaran yang dilakukan oleh **Wajib Pajak Sendiri**.

Pungutan PPh pasal 25, yaitu :

Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk

setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
Cara menghitung PPh pasal 25 adalah sebesar penghasilan yang terutang menurut SPT dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak serta pajak yang dibayar atau terutang.

$$\text{PPh 25} = \text{PPh tahun lalu} - (\text{PPh pasal 21} + \text{PPh pasal 22} + \text{PPh pasal 23} + \text{PPh pasal 24})$$

12 (Bulan/tahun)

Misal :

- Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT (Tahunan) PPh tahun 2000 Rp. 50.000.000,00 dikurangi :

- a. PPh Pasal 21 Rp. 15.000.000,00
- b. PPh Pasal 22 Rp. 10.000.000,00
- c. PPh Pasal 23 Rp. 2.500.000,00
- d. PPh pasal 24 Rp. 7.500.000,00+
- Rp. 35.000.000,00

Maka selisihnya = Rp. 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri Rp. 1.250.000,00 (Rp. 15.000.000,00 dibagi 12)

Tiap bulannya Wajib pajak harus menyeter sendiri pajak yang terutang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dan harus melaporkan sendiri pajak yang disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giri dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak di Wajib Pajak berdomisili selambat-lambatnya tanggal 20.

ad.2. Pelunasan/pembayaran pada akhir tahun pajak.

Pada akhir tahun Wajib Pajak melakukan penghitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan SPT (tahunan).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29, bahwa apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan."

Berdasarkan pada paparan tersebut diatas, maka menurut penulis, menunjukan bahwa didalam pemungutan atas pajak penghasilan sebagaimana yang diatur didalam UU Pajak Penghasilan, ternyata tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sebagaimana yang dikehendaki dari *Sistem Self Assessment* secara murni yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Hal ini ditunjukan dengan pemungutan atas pasal 21, pasal 22, pasal 23 , pasal 24 dan pasal 26 yaitu dipotong melalui pihak ketiga atau dengan cara *Withholding Sistem*. Pihak ketiga yang melakukan pemungutan atau pemotongan pajak tersebut yaitu dapat dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan usaha, penyelenggara kegiatan atau juga orang pribadi tertentu yaitu Akuntan, Notaris, PPAT, orang pribadi yang menyelenggarakan usaha pembukuan.

Hal ini menunjukkan bahawa pemungutan pajak penghasilan yang diatur dalam UU PPh *Sistem Self Assessmet*, ternyata tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen (*full assessment*), tetapi masih sebatas *Semi Self Assesment* karena masih besarnya peran pihak ketiga atau *With Holding Sistem* dalam melakukan pungutan pajaknya.

Tidak dilaksanakannya sistem *self assessment* secara murni dan konsisten ini, juga diperkuat dengan berlakunya PPh yang bersifat Final yaitu pada pasal 4 ayat 2 UU PPh.

Pengertian final disini adalah pengenaan pajak dengan tarif tersendiri (atas penghasilan pada saat diterima Wajib Pajak dan tidak dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun. Pelunasan PPh final, bisa diterapkan melalui pemotongan atau pemungutan dan bisa pula dilakukan melalui penyeteroran sendiri dimungkinkan¹²².

Dasar hukum dari PPh final ini adalah Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 tahun 2000 tentang PPh dan dikenakan terhadap penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 17 tahun 2000 tentang PPh, yang menyatakan :

"Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasi-

122. Fauzi Malik, Masalah PPh Final dan Implementasinya, Makalah seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Bina Pajak Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia Bekerjasama Widyaaiswara Pusdiklat Perpajakan Departement Keuangan Republik Indonesia, 15 Oktober 1997, Semarang.

lan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah"

Dalam pelaksanaannya pajak final, maka telah ditetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pajak final, antara lain yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Dengan tarif 20 % X bunga deposito.

2. Peraturan Pemerintah No. 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.

Dengan tarif 25 % dari jumlah bruto hadiah undian.

3. Peraturan Pemerintah No. 139 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek.

Dengan tarif :

- 15 % dari jumlah bruto bagi Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- 20 % dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
- 0,03 % dari keuntungan modal, bunga dan atau diskonto yang diperoleh pemilik obligasi.

4. Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 2000 ten-

tang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan tarif :

- a. 4 % dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- b. 2 % dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
- c. 4 % dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Apabila dilihat dari segi pelaksanaannya UU Perpajakan secara keseluruhan, menurut penulis pemenuhan PPh Final ini akan mengakibatkan :

- a. Pengenaan PPh final tampaknya bertentangan dengan pengertian PPh sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian tahun pajak adalah tahun takwim atau tahun buku yang meliputi jangka waktu dua belas bulan (penjelasan Pasal 1). Berdasarkan dari pengertian yang diberikan oleh pasal 1 dan penjelasannya, maka PPh final ini menurut Mansury. R¹²³ suatu hal yang tidak adil sebagaimana dikeluhkan oleh Wajib Pajak dalam hal

123. Mansury. R. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan. Jilid 3, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1996, hal. 187.

:

(1) apabila dari suatu transaksi Wajib pajak mengalami kerugian, tetapi atas transaksi tersebut, tetap harus membayar Pajak Penghasilannya.

(2) Pengenaan PPh final menyebabkan hak Wajib Pajak untuk memperhitungkan dengan PTKP tidak dapat dipergunakan.

b. Menyalahi definisi perpajakan

Pajak Penghasilan adalah termasuk Pajak Langsung yang menurut definisinya adalah pajak yang langsung dibebankan kepada Wajib Pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan sangat memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak kaitannya dengan pengurangan PTKP, yang dikenakan setiap tahun/berkala dan tidak dapat dibebankan sebagai harga pokok. Tetapi dalam kenyataannya, berdasarkan pengamatan penulis pemotongan PPh final lebih mengarah pada **Sistem Pajak Tidak Langsung** seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang dipotong/dipungut setiap terjadi peristiwa atau kejadian, dan adaya kemungkinan Wajib Pajak membebankan kepada harga pokok konsumen. Misalnya BBM.

c. Kaitannya dengan Pelaksanaan *Sistem Self Assessment*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan dari sistem *self assessment* dalam PPh yaitu terlihat dalam pengisi SPT Masa atau SPT tahunan yang dilakukan Wajib Pajak.

Dengan adanya pajak final ini, tentu berten-tangan dengan sistem *self assessment*, karena pajak telah langsung dipungut oleh pihak ketiga dan Wajib Pajak tidak menghitung sen-diri tetapi langsung dipotong berdasarkan tarif tersendiri dengan tidak dicantumkan dalam SPTnya.

Didalam sistem *Self Assessment*, didalam perundang-undangnya telah memberikan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak dalam pem-bayaran pajaknya, sehingga pajak secara final ini dapat mengurangi hak Wajib Pajak untuk :

1. memperhitungkan dengan pajak penghasilan akhir tahun, hal ini karena pajak final langsung dipungut saat adanya peristiwa/transaksi/pembayaran;
2. mengajukan keberatan dan mohon banding;
3. dalam hal pengusaha mengalami rugi, meski-pun undang-undang menentukan bebas pajak, tetapi karena dipungut secara final, tetap dibebani pajak sebagaimana pengusaha lainnya yang mendapat untung, sehingga hilanglah hak keadilan vertikal bagi wajib pajak.

Namun demikian, PPh Final ini juga dapat menimbulkan hal-hal yang positif kaitannya dengan penerimaan pajak, yaitu :

a. Bagi Wajib Pajak:

- mengefisienkan administrasi Wajib pajak

karena dapat langsung dipungut.

- lebih praktis atau mungkin saja beban pajaknya lebih rendah jika dihitung dari Laba/Penghasilan Neto.

b. Bagi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

- negara dapat secara langsung menerima pendapatan pajak.
- adanya kesederhanaan atau efektifitas dalam administrasi pajaknya karena cara pemungutan secara langsung pada saat transaksi terjadi.

4. Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa sistem *self assessment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Keberhasilan *Sistem Self Assessment* selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak membayar pajaknya juga ditentukan oleh tindakan penegakan hukum (*law enforcement*). Salah satu penegakan hukum pajak diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak.

Menurut pasal 1 angka 24 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan ini dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000.

Yang menjadi fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah ketaatan (*compliance*) wajib pajak dalam melaksanakan *Sistem Self Assessment*. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berawal dari SPT, selanjutnya pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, pembukuan/pencatatan yang dijadikan dasar pengisian SPT.¹²⁴

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan *fiskus* dalam hal :

- a. Interpretasi UU yang tidak benar;
- b. Kesalahan hitung atau tulis yang dilakukan Wajib Pajak;
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan;
- d. Pemotongan, pemungutan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- e. Sasaran lain sesuai dengan UU yang berlaku.

Tujuan pemeriksaan pajak pada UU No. 6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan kemudian dilanjutkan dengan UU No. 9 tahun 1994 tentang KUP sebagaimana yang dirubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 6

124. Soewito, Pemeriksaan Pajak, Makalah Seminar Tema "Memahami Tata Cara Penerapan UU Perpajakan yang baru diluncurkan dan Peraturan Pelaksananya serta permasalahannya, oleh Lembaga Bina Pajak dan Widyaaiswara Departemen Keuangan, Semarang, 15 Oktober 1997, hal. 1.

tahun 1984. mengalami perubahan yang mendasar yaitu :

Pada UU No. 6 tahun 1984 tentang KUP

- Pasal 29 (1) bahwa pemeriksaan pajak bertujuan untuk penetapan pajak yang terutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan ini bertitik tolak dengan cara melakukan pengujian, memilah-milah SPT, ditentukan mana yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dan mana yang memenuhi ketentuan perpajakan. SPT yang dianggap telah memenuhi sudah tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga pemeriksaan pajak dilakukan lebih selektif.

Pada UU No. 9 tahun 1994 tentang KUP, telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Pasal 29 ayat (1) bahwa pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adanya pemeriksaan ini, menurut peneliti bertitik tolak dari adanya kecurigaan dari *fiskus* (aparatur pajak) bahwa semua SPT belum memenuhi ketentuan UU Perpajakan, sehingga praktis semua SPT Wajib Pajak yang masuk baik yang benar maupun yang tidak benar

dapat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Dengan prinsip tersebut, menurut Hussein Kartasasmita¹²⁵, adalah mencari kesalahan, dapat diumpamakan dengan aparat kepolisian yang menyetop semua kendaraan, untuk menguji apakah para pengemudi telah melaksanakan UU Lalu Lintas atau belum?

Didalam UU No. 9 tahun 1994 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000, pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) pada UU No. 7 Tahun 1984 tersebut dicabut atau dihapus.

Pada UU No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan terdapat pasal 30 ayat (4) dan (5), yaitu :

- (4) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang ini.
- (5) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan **bukti**, bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan itu tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang yang semestinya.

Maka dengan dihapusnya pasal tersebut, sejak tahun 1994 yaitu melalui UU No. 9 tahun 1994 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000, menurut penulis sifat *self assessment* dalam pemeriksaan pajak penghasilan tidak berfungsi lagi, karena jiwa *self assessment* ada pada pasal tersebut. Maka dengan dihapusnya pasal tersebut,

125. Hussein Kartasasmita. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7. 1999. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Hal. 57.

pemeriksaan tidak lagi memperhatikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) tetapi lebih mengarah pada praduga bersalah. Khususnya pada SPT yang lebih bayar (*restitusi*) pasti akan dilakukan pemeriksaan oleh fiskus baik pajak yang besar maupun yang kecil, hal ini karena adanya anggapan bahwa yang SPT lebih Bayar diduga salah atau sengaja mengisi tidak benar. Hal ini berkebalikan terhadap SPT Kurang Bayar dan SPT Nihil, tidak dilakukan pemeriksaan pajaknya.

Dengan mendasarkan pada paparan tersebut diatas menurut penulis Sistem *Self Assessment* dalam pemeriksaan pajak ini telah ditinggalkan, dengan ditunjukan dengan masih aktifnya *fiskus* dalam melakukan pemeriksaan pajak tersebut. Sehingga dalam pemeriksaan pajak penghasilan ini lebih mengarah pada sistem *official assessment*, karena setelah dilakukan pemeriksaan maka fiskus akan mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan Wajib Pajak harus membayar pajaknya sesuai SKP yang telah ditetapkan tersebut.

Dengan demikian *Sistem Self Assessment* dalam pemeriksaan pajak penghasilan sejak tahun 1994 sampai sekarang sudah tidak murni lagi.

Selain tersebut diatas, adanya ketentuan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun batas waktu pemeriksaan, hal ini kaitannya dengan *sistem self assessment* justru akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi wajib pajak tentang berapa besar pajak yang seharusnya terutang. Disamping itu juga penambahan beban bagi Wajib Pajak untuk dapat menyerahkan bukti-bukti

pembukuan dan pemberian penjelasan yang diminta petugas pemeriksa mengenai usaha sepuluh tahun yang lalu sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (1) UU KUP.

5. Sanksi-Sanksi Perpajakan

Untuk ketentuan-ketentuan UU Pajak, wajib Pajak mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dan akan dikenai ancaman berbagai sanksi jika tidak dilakukan. Di dalam UU Perpajakan dikenal adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Kedua sanksi ini dapat dikenakan kepada Wajib Pajak baik sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja atau kedua-duanya.

Sanksi Administrasi

Dikenakan terhadap Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Dapat berupa : bunga, denda dan kenaikan pajaknya.

- Sanksi Bunga

Pasal 8 ayat (2) UU KUP yaitu :

" Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar,

dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu.

- **Sanksi Denda**

Pasal 7 ayat (1) UU KUP
Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 untuk SPT Masa dan sebesar Rp. 100.000,00.

- **Sanksi kenaikan**

Pasal 15 ayat (2) UU KUP

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Sanksi pidana

Sanksi pidana terdiri atas sanksi pidana dengan sifat kealpaan dan sanksi pidana yang sifatnya kesengajaan.

Pasal 38 UU KUP

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan SPT; atau
 - b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
- sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 39

(1) Setiap orang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahguna kan atau menggunakan hak NPWP atau Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

- b. tidak menyampaikan SPT; atau
- c. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29; atau
- e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindakan administrasi yang berupa sanksi administrasi lebih sering digunakan dalam menangani pelanggaran dan kejahatan dibidang perpajakan. Hal ini semata-mata *fiscus* berusaha agar wajib pajak itu selalu membayar pajaknya yang terutang. Sanksi administrasi ini lebih ditekankan untuk kepentingan negara yang bersifat ekonomis yaitu supaya pemasukan negara dari sektor pajak dapat meningkat terus.

Disamping itu , untuk kepentingan negara, maka atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 44 B ayat (1) UU KUP). Penghentian penyidikan tindak pidana dimaksud, hanya dilakukan apabila wajib pajak bersedia melunasi pajak dan

sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau belum dibayar (Pasal 44B ayat (2) UU KUP).

Ketentuan Pasal 44B KUP, ini menunjukkan bahwa yang diutamakan adalah penerimaan negara (pajak telah dibayar), dan sanksi pidana hanya sebagai senjata terakhir.

3.2.a. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Semarang

Sistem *self assessment* didalam pelaksanaan pajak penghasilan telah dilaksanakan sejak 1 Januari 1984, yaitu dengan di Undang-Undangkannya UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kemudian perubahan yang terakhir dengan UU No.16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP dan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahan terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari 3 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang yaitu KPP Semarang Timur, KPP Semarang Selatan dan KPP Semarang Barat, diperoleh data tentang :

Tabel 1
Pertumbuhan Jumlah WP PPh Orang Pribadi
di Kota Semarang

Kantor Pelayanan Pajak	Tahun Pajak		
	1998	1999	2000
KPP Semarang Timur	5597	5098	6088
KPP Semarang Selatan	6136	6399	7763
KPP Semarang Barat	7504	7454	9280
Jumlah WP PPh	19237	18951	23131
Sumber dari : Laporan TUP Jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi tahun 1998, 1999 dan 2000 KPP Semarang Selatan, KPP Semarang Timur dan KPP Semarang Barat.			

Tabel 2
Pertumbuhan Realisasi
Penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan
Kota Semarang
(dalam jutaan rupiah)

Kantor Pelayanan Pajak	Tahun Pajak		
	1998	1999	2000
KPP Semarang Timur	11.395	8.366	2.222,3
KPP Semarang Selatan	2.453	1.262	1.137
KPP Semarang Barat	3.469	1.214	1.146
Jumlah Penerimaan PPh Op	17.317	10.842	4.505,3

Sumber : Realisasi Penerimaan PPh Kanwil X Ditjen Pajak
Jawa Tengah - DIY.

Data telah diolah penulis

Keterangan Tambahan : sejak bulan Pebruari tahun 2002 di 3 KPP tersebut dipecah lagi menjadi 4 yaitu adanya KPP Semarang Tengah yang masih dalam perbaikan administrasinya.

Analisis data Tahun 1998-1999

Berdasarkan data dari tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa tahun 1998 sampai 1999 adanya penurunan jumlah Wajib Pajak di kota Semarang yaitu dari 19.237 orang menjadi 18.951 orang atau berkurang sebanyak 286 orang.

Penurunan jumlah Wajib Pajak ini ternyata juga diikuti dengan penurunan jumlah penerimaan PPh OP, yaitu tahun 1998 sampai tahun 1999 dari Rp. 17,317 Milyar menjadi Rp. 10,842 Milyar atau berkurang sebesar Rp. 6,475 Milyar. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa terjadi penurunan jumlah Wajib pajak dan penurunan penerimaan PPh Perorangan dan penurunan jumlah penerimaan PPh OP dari tahun 1998 sampai tahun 1999?

Adapun yang menyebabkan terjadinya penurunan Jumlah WP dan penerimaan PPh Orang Pribadi, karena :

1. Adanya krisis ekonomi yang saat itu menimpa bangsa Indonesia sehingga banyaknya usaha-usaha yang tutup karena imbas krisis ekonomi saat itu, sehingga banyaknya WP PPh OP yang mempunyai usaha mengalami kemunduran usahanya atau bahkan mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat membayar pajaknya, juga banyaknya WP yang minta pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajaknya (NPWP) dengan alasan tidak mempunyai usaha lagi.
2. Adanya kebijakan SK. Menkeu No. 36/KMK.04/1998 tentang Perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diberlakukan mulai tahun 1999. Kebijakan ini mengatur tentang batasan penghasilan yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak PPh OP.¹²⁶

Perubahan PTKP tersebut yaitu :
Tabel 3

No.	Uraian	tahun 1998 dan sebelumnya	1999
1.	Wajib Pajak belum kawin	1.728.000	2.880.000
2.	Tambahan Wajib Pajak Kawin	864.000	1.444.000
3.	Tambahan isteri bekerja	1.728.000	2.880.000
4.	Tambahan anak/tanggungan keluarga maksimal 3	864.000	1.444.000

Sumber : Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994 tentang PPh dan SK. Menkeu No: 36/KMK.04/1998 tentang Perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diberlakukan mulai tahun 1999.

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukan adanya

126. Wawancara BP. R. Ali Sholeh, Kasubsi IAP Kanwil Pajak VIII Jawa Tengah dan DIY, 2 Maret 2001.

perubahan tentang penambahan jumlah PTKP, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah WP PPh OP. Hal ini disebabkan bila orang yang semula penghasilannya Rp. 1.728.000/tahun keatas (WP belum kawin) dapat dikenakan pajak PPh OP. Tetapi dengan dikeluarkannya SK. Menkeu No. 361/KMK.04/1998 yang mulai berlaku sejak tahun 1999, maka WP yang berpenghasilan Rp. 2.880.000/tahun keatas yang dikenakan pajak sebagai WP PPh Orang Pribadi (OP), sedangkan berpenghasilan dibawah Rp.2.880.000/setahun, tidak dikenakan pajak. Dengan demikian bila kita perhatikan, WP OP yang sebelum tahun 1999 mempunyai penghasilan Rp. 1.728.000/tahun telah dikenakan PPh OP. Tetapi sejak tahun 1999 dengan penghasilan yang sama tersebut tidak lagi dikenakan PPh OP atau menjadi SPT NIHIL. Sehingga dengan adanya penurunan jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi tersebut tentunya juga diikuti penurunan penerimaan PPh OP di Kota Semarang pada tahun 1999 tersebut. Perubahan PTKP ini untuk memenuhi rasa keadilan bagi Wajib Pajak sesuai dengan pertambahan kebutuhan fisik minimum dan perkembangan harga yang terjadi di masyarakat.

Analisis data Tahun 1999-2000

Berdasarkan data tabel 1 dan tabel 2 diatas dapat diperoleh data, bahwa :

- a. pada tahun 2000 jumlah WP PPh Orang Pribadi menunjukkan adanya pertambahan jumlah WP PPh Orang Pribadi yaitu dari 18.951 orang menjadi 23.131 orang sehingga bertambah sebanyak 4.180 orang. Hal ini menunjukkan upaya *ekstensifikasi* (penambahan jumlah Wajib Pajak)

mengalami keberhasilan dengan adanya penambahan tersebut.

- b. tapi bila dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak PPh OP pada tahun 2000 ternyata mengalami penurunan dari Rp.10,842,- milyar menjadi Rp. 4,505,3 milyar, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 6,336,7 Milyar.

Hal ini disebabkan mulai tahun 2000 penerimaan pajak BPHTB yang semula masuk pada bagian PPh Orang Pribadi kemudian menjadi pajak yang bersifat final. Dan juga masih disebabkan keadaan krisis ekonomi yang belum membaik.

Walaupun *Sistem Self Assessment* telah dilaksanakan selama 17 tahun , yang dimulai tahun 1984 seiring dengan perjalanan waktu ternyata dalam pelaksanaannya selama ini berdasarkan hasil penelitian peneliti pada pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Semarang masih ditemuinya hambatan -hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan *Sistem Self Assessment* tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa *Sistem Self Assessment* adalah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan anggapan bahwa Wajib Pajak adalah jujur, tetapi dalam hal ini menurut Rochmat Soemitro¹²⁷ bahwa rakyat kita belum secara menyeluruh, masyarakat ada pada tingkat tersebut, akan tetapi kalau

127. Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1988, hal.20.

menunggu sampai rakyat kita mencapai taraf yang demikian mungkin kita tidak akan sampai pada saat itu.

Hambatan-hambatan pada pelaksanaan *Sistem self Assessmet* pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP) berdasarkan penelitian di Kota Semarang, yaitu meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

A. Intern

(1) Sarana dan Prasarana tidak mendukung

Kurangnya fasilitas komputer yang mendukung cepatnya, dan seefisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan penelitian lapangan peneliti, ternyata pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat dan Semarang Timur masih kurangnya fasilitas komputer, misalnya pada bagian seksi PPh OP yang berjumlah 14 orang hanya mempunyai satu komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini mengakibatkan karyawan harus antri/bergantian menggunakan komputernya. Hal ini tentunya akan dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan. Juga tidak adanya fasilitas mobil untuk melakukan pemeriksaan di lapangan misalnya ke tempat yang jauh.

Juga pada bidang sarana administrasi perpajakan tidak mendukung yaitu dalam hal bentuk SPTnya. Hal ini dijumpukan masih banyaknya wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPT, meskipun formulir SPT selalu dilengkapi dengan buku petunjuk cara pengisiannya, namun masih banyaknya Wajib Pajak yang merasa kesulitan untuk mengisi sendiri SPT.

Dengan adanya kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan fiskal ini, tentunya akan mempengaruhi produktivitas pekerjaan fiskus untuk melaksanakan pekerjaan dan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

(2) Kurangnya informasi *fiskus* tentang perkembangan usaha Wajib Pajak

Aparatur pajak (*fiskus*) tidak sepenuhnya menguasai data dan perkembangan usaha Wajib Pajak. Hal ini karena data yang diketahui *fiskus* hanya data awalnya saja yaitu pada waktu mengajukan NPWP, sedangkan perkembangan usahanya tidak pernah dilaporkannya.

Misalnya : ganti usahanya, atau usahanya telah tutup atau telah pindah.

Hal ini tentunya akan menyulitkan *fiskus* dalam melakukan pemeriksaan terhadap obyek pajaknya dengan ganti alamat atau telah tutup.

Menurut penulis, hal ini di samping karena keadaan masyarakat Wajib pajak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar, hal ini juga disebabkan sarana administrasi perpajakan sendiri yang tidak mendukung adanya pengetahuan tentang perkembangan usaha wajib pajak. Menurut peneliti, sarana administrasi ini adalah bentuk formulir SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Formulir 1770-1) yang berlaku sekarang ini terutama pada lampirannya tidak terdapat kolom

yang dapat menampung adanya mutasi dan penambahan harta Wajib Pajak baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dengan tidak adanya lampiran tentang perkiraan biaya hidup sebulan, tentunya fiskus tidak akan mengetahui perkembangan dan mutasi penambahan jumlah kekayaan Wajib Pajak. Sehingga hal ini akan menimbulkan *loophole* (lubang hukum) mengakibatkan timbulnya pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seolah-olah Wajib Pajak telah diberi peluang untuk tidak melaporkan berapa jumlah yang dikonsumsi dan berapa jumlah mutasi harta atau lebih jauh mungkin dapat menimbulkan penyeludupan pajak (*tax avoidance*).¹²⁸

(3) Terlalu seringnya Undang-undang berubah

Selama ini khusus pada pajak penghasilan memang telah mengalami 3 perubahan perundang-undangan yaitu dengan UU No. 7 tahun 1983, UU No. 10 tahun 1994, terakhir dengan perubahan UU No. 17 tahun 2000 yang mulai berlaku 1 Januari 2001. Dengan seringnya pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi perpajakan, ternyata tidak diikuti kesiapan SDM-nya, juga sarana administrasinya, misalnya pasalnya berubah ternyata petunjuk pelaksanaan

¹²⁸. Penyeludupan pajak/*tax avoidance* adalah Wajib Pajak menyembunyikan kekayaan atau penghasilannya dengan jalan memberikan keterangan yang tidak benar, atau mengajukan pernyataan yang tidak benar atau memberikan data-data yang tidak benar atau keterangan palsu pada dokumennya. (Amin Widjaya Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.62)

dilapangan belum ada, tentunya fiskus akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan UU tersebut dilapangan.

- (4) Ketidaktegasan di dalam penerapan sanksi hukumnya
- Selama ini sebenarnya banyak Wajib Pajak yang seharusnya sudah wajib ber-NPWP (memenuhi penghasilan melebihi PTKP) tetapi tidak mempunyai NPWP atau tidak melakukan pembayaran pajak. Terhadap hal ini mereka tidak dikenai sanksi apapun. Sampai saat ini berdasarkan penelitian peneliti dilapangan belum pernah ada Wajib pajak dipidana dengan alasan tidak membayar pajak atau tidak ber-NPWP. Padahal, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa :

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib (NPWP)".

Sedangkan pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

- (a) Setiap orang yang tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 2.
- (g)dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar "

Berdasarkan hasil penelitian peneliti selama ini di kota Semarang, walaupun sanksi pidana ini sudah ada sejak UU No. 6 tahun 1984 sampai sekarang belum pernah adanya penerapan sanksi pidana terse-

but.¹²⁹ Hal ini menunjukan bahwa *law enforcement* atas pajak ini tidak tegas.

b. Ekstern

(1) Kurangnya kesadaran hukum Wajib Pajak mengenai arti pentingnya pajak.

Kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹³⁰ Di dalam masyarakat, ketertiban tentunya merupakan hal yang sangat diperlukan terutama untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia bahwa kedamaian tersebut berarti adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah) dan ketentraman (bersifat batiniah). Untuk mencapai ketertiban dan ketentraman tentunya erat kaitannya dengan adanya kesadaran hukum di dalam masyarakat, karena hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/ atau hukum yang tidak baik. Jadi kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin

129. Wawancara Bp. Amiruddin, Kasi PPh OP KPP Semarang Selatan dan Bp. Subandi, Kasi PPh OP KPP Semarang Barat.

130. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 13.

tidak timbul.¹³¹ Kesadaran hukum yang merupakan abstrak dari diri manusia tentunya juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat terhadap fungsi pajak di dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan maka sebagai warganegara tentunya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur di dalam undang-undangan.

Pajak Penghasilan diatur melalui UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU ini mengatur bahwa Subyek Pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi adalah yang berpenghasilan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan wajib mempunyai NPWP. Selama ini berdasarkan penelitian lapangan masih banyaknya Subyek Wajib yang berdasarkan kriteria sebagai Wajib Pajak PPh OP berdasarkan penghasilan dan harta kekayaan seharusnya ber-NPWP, tetapi ternyata tidak mempunyai NPWP atau tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu HR pengusaha toko kelontong dan usaha kue yang cukup sukses telah berjalan selama 5 tahun, Ibu NR memiliki suatu CV bidang supplier dan biro jasa

131. Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Press, Jakarta, 198.

entertainment seharusnya berdasarkan penghasilannya merupakan Wajib Pajak yang harus berNPWP, ternyata sampai saat ini tidak mempunyai NPWP dengan alasan belum membutuhkannya sehingga tidak pernah membayar pajak PPh, juga merasa selama ini tidak pernah ada petugas pajak yang mendatangnya dan selama ini tidak mempunyai masalah apa-apa.

Mereka sebenarnya tahu adanya pemungutan PPh.

Menurut Rochmat Soemitro, pada umumnya orang segan membayar pajak karena pajak tidak memberikan imbalan secara langsung seperti jual beli, tukar menukar, sewa beli dan sebagainya yang nyata bahwa dari uang yang dikeluarkan diterima kembali sesuatu. Sebaliknya orang yang kesadarannya tebal, yang mengerti fungsi pajak dalam masyarakat, mengerti dampak pajak dalam masyarakat dan mengerti dampak pajak kepada individu, akan dengan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksa.¹³²

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 orang kepada Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (OP) yang mempunyai NPWP atau membayar pajak PPh, diperoleh jawaban atas pertanyaan :

- Alasan apa yang mendorong Saudara rajin/taat membayar pajak tiap bulannya dan memasukkan SPT pada akhir tahun ?

132. Rohmat Soemitro, Pajak ditinjau dari Segi Hukum, Loc. Cit. hal. 1.

Diperoleh jawaban :

a. Karena kesadarannya sendiri sebagai kewajiban kenegaraan :

32 Orang atau 32%

b. Takut sanksinya atau UU-nya :

68 orang atau 68 %.

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa kemauan Wajib Pajak membayar pajak belum didorong adanya kesadaran pajak, melainkan baru didorong oleh adanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yaitu karena takut sanksinya.

Hal ini juga didukung data dari Drs. Subandi, Ak.MM, Kasi PPh Orang Pribadi KPP Semarang Barat¹³³, pada umumnya Wajib Pajak PPh Perorangan menjadi Wajib Pajak dengan mengajukan NPWP karena alasan "kebutuhan sendiri" yaitu agar dapat memenuhi syarat dalam hal :

- mengajukan kredit bank
- memperoleh tender atau proyek
- melakukan usaha tertentu misalnya mendirikan wartel.
- pekerjaan profesi :notaris, pengacara atau dokter dsb.

Dengan demikian, adanya kesadaran pajak memerlukan adanya pengertian dari masyarakat tentang fungsi pajak dan manfaat pajak. Sehingga pengertian tersebut akan membawa ke arah kesadaran pajak (*tax*

133. Wawancara tanggal 7 Maret 2001

consciousness) selanjutnya akan timbul kesukaan terhadap pajak (*tax mindedness*) dan akhirnya akan adanya disiplin pajak (*tax discipline*) sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban membayar pajaknya dengan jujur dan tepat waktu .¹³⁴

(2) Kurang Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak Penghasilan.

Selama ini, dilapangan masih banyak kita temui masyarakat yang tidak tahu tentang adanya kewajiban membayar pajak penghasilan dan mempunyai NPWP bagi mereka yang telah berpenghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Mereka umumnya mengetahui tentang pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini memang harus kita akui bahwa selama ini pengetahuan tentang pajak masih sangat kurang, karena tidak adanya pendidikan khusus tentang pajak yang diperoleh sejak bangku sekolah dasar.

Kurangnya pengetahuan tentang pajak ini juga terlihat pada waktu Wajib Pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunannya ternyata masih banyak yang mengalami kesulitan. Bagi yang mengalami kesulitan ini sebenarnya Kantor Pelayanan Pajak telah memberikan petunjuknya pada waktu penyuluhan pajak tentang pengisian SPT. Tetapi selama ini bila adanya undangan penyuluhan lebih banyak yang tidak datang. Maka bagi mereka yang mengalami

134. Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 2, Eresco, Bandung, 1991, hal.14.

kesulitan pengisian SPTnya mereka akan menyerahkan ke konsulen/konsultan pajak atau juga pada orang yang lebih tahu atau berpengalaman.

Masih banyaknya Wajib Pajak PPh OP yang membuat laporan keuangan usahanya dengan sangat sederhana bahkan masih banyak juga yang tidak membuat catatan atau pembukuan sama sekarang. Hal ini tentunya membuat kesulitan fiskus membuat untuk mengadakan pemeriksaan.

Mengapa WP tidak membuat catatan atau laporan keuangan atas usahanya?

Alasannya WP tidak melakukan catatan atau pembukuan, sebagai berikut :

1. Tidak tahu kalau harus membuat catatan seperti yang diharuskan sesuai buku petunjuk pemakaian norma penghitungan.
2. Karena kesibukan, catatan tidak dapat di buat tiap hari.

Tidak adanya pembukuan atau catatan ini tentunya akan menyulitkan aparat pajak/fiskus untuk memeriksa kebenaran laporan atas penghasilan/pendapatan Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu mereka tidak memisahkan antara pengeluaran usaha dengan pengeluaran rumah tangga.

(3) Kurangnya Koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Selama ini masuknya data tentang Wajib Pajak dari pihak lain diluar administrasi pajak sangat kur-

ang, karena adanya anggapan masalah pemungutan pajak hanya urusan Ditjen Pajak sendiri. Hal ini menyebabkan fiskus kesulitan untuk dapat menambah jumlah Wajib Pajak baru (ektensifikasi).

Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo¹³⁵, yang menjadi hambatan pemungutan pajak, dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat disebabkan, oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari dari pajak. Bentuknya berupa :

- *tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

Misalnya : dalam penghitungan PTKP, anak tanggungan yang telah berumur 40 tahun dianggap masih menjadi tanggungannya. Tujuannya untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

- *tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan

135. Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta, Andi Offset, 1997, hal.9-10.

cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Misalnya: Wajib pajak memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan kekayaan atau penghasilannya.¹³⁶

3.2.b. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, nampak pelaksanaan Sistem *Self Assesment* selama ini belum dapat dilaksanakan secara efektif terbukti masih banyak ditemui hambatan-hambatan dilapangan. Upaya-upaya yang dilakukan KPP selama ini belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil peneliti dilapangan, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak di Semarang dalam pelaksanaan agar *Sistem Self Assessment* pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP) yaitu meliputi :¹³⁷

1. Mengadakan penyuluhan perpajakan

Mengingat bahwa tidak semua masyarakat Wajib pajak memahami dan mengerti masalah perpajakan, maka metode pemberian penyuluhan kepada Wajib pajak masih sangat relevan untuk dilaksanakan. Karena sebagai

136. Wawancara dengan Ibu Ari Purwanti, Seksi Verifikasi KPP Semarang Timur tanggal 30 Juli 2001.

137. Wawancara Bp. Amiruddin, Kabag. Pajak Orang Pribadi KPP Semarang Selatan, tanggal 1 Agustus 2001.

konsekuensi diterapkannya *Sistem Self Assessment* kantor pajak semata-mata sebagai kantor inspeksi saja, tetapi justru yang lebih ditekankan pada tindakan pembinaan, pelayanan, bimbingan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat benar-benar mengerti serta memahami perpajakan baik mengenai peraturannya, hak dan kewajibannya. Sehingga dengan penyuluhan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan kesadaran terhadap hukum yaitu undang-undang pajak.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa saja yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau yang tidak baik, penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, karenamasyarakat mengharapkan keadilan.¹³⁸

Penilaian tersebut timbul karena manusia di dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaannya. Indikator yang terdapat di dalam kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto ada 4 macam, yaitu: ¹³⁹

a. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini menyangkut perilaku yang dilarang oleh

138. Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali Pers, 1982, hal.211.

139. Ibid, hal.28-29.

- hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum yang menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban
- b. Pemahaman Hukum
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
 - c. Sikap Hukum
Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
 - d. Perilaku Hukum
Seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tentunya harus mendapat umpan balik dari pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan di segala bidang, sehingga tercipta suatu iklim penghidupan yang lebih bersemangat dalam bergairah di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selama ini Kantor Pelayanan Pajak terus melakukan penyuluhan secara berkala terutama pada saat-saat menghadapi pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Masa maupun Tahunan. Dalam penyuluhan, Wajib Pajak diberikan berbagai macam buku panduan, brosur atau buku-buku lain yang bersifat memberikan gambaran atau penjelasan tentang hak dan kewajiban PPh OP. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak semakin pandai dan mandiri khususnya di bidang pengetahuan perpajakan dengan segala cara penghitungannya, dan diharapkan adanya respon atau tanggapan dari Wajib pajak yang akhirnya terwujud dalam bentuk "perbuatan" yaitu mau membayar atau melunasi hutang pajaknya dengan baik kepada

pemerintah melalui bank-bank yang ditunjuk atau melalui Kantor Pos setempat.

Selain itu dalam memberikan penyuluhan Wajib Pajak, juga dihimbau dan diarahkan agar mereka menyadari bahwa pajak yang mereka berikan secara tidak langsung akan diberikan dan dinikmati kembali oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum yang disediakan pemerintah berupa : misalnya sekolahan, rumah sakit, jalan, jembatan dan sebagainya.

Penyuluhan juga dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan cara memasang pamflet atau, spanduk-spanduk di jalan guna mengingatkan terhadap kewajina pajaknya misalnya dengan kalimat "Orang Bijak Taat Pajak" atau "Pajakku Lunas Tidurku Pulas", melalui media massa, radio, Televisi, seminar-seminar.

2. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan

Perlu disadari bahwa dengan semakin kemudahan itu banyak diberikan kepada Wajib Pajak, tentunya akan mendorong Wajib pajak dan calon Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar menurut ketentuan perundang-undangan.

Peningkatan pelayanan ini dilakukan antara lain dengan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak, misalnya dengan memperbanyak tempat pembayaran, pelayanan langsung, cepat dan efisien. Juga dilakukan pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara gratis dan dalam

satu hari selesai.

Tindakan pengawasan administrasi dengan penggunaan teknologi modern dalam mengefektifkan kegiatan pemungutan PPh Orang Pribadi dengan komputerisasi atas SPT Masa maupun Tahunan. Juga adanya klinik pajak bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan atau bimbingan pengisian SPT atau mengalami kesulitan lainnya yang berhubungan dengan perpajakan.

3. Mengadakan kerjasama dengan instansi lainya yang terkait.

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan selama ini yaitu kerjasama tentang :

- Jual beli tanah atau bangunan dengan pajak BPHTB (Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dengan Notaris atau PPAT;
- Kredit bank dengan bank BUMN maupun swasta;
- Pengajuan tender proyek dengan asosiasi pengusaha (KADIN, Gapensi);
- Jual beli mobil dengan Samsat.

4. Sarana dan Prasarana

Kurangnya fasilitas komputer yang memadai dibandingkan dengan jumlah aparat fiskus, maka selama ini untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaannya maka fiskus dalam hal ini mengantisipasi dengan membawa komputer sendiri. Juga selama ini Direktorat Pajak berusaha melakukan peningkatan pelayanan dengan adanya

komputerisasi secara on line walaupun di antara KPP belum seluruhnya dapat dicapai secara on line semua. Selain itu dengan telah adanya jaringan internet bagi masyarakat umum melalui alamat E Mail www.pajak.go.id dapat diketahui tentang segala peraturan-peraturan terbaru tentang pajak.(dalam penelitian ini data juga diperoleh dari alamat e mail tersebut).

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Untuk dapat menghasilkan aparat pajak yang bersih dan berkualitas maka Direktorat Jenderal Pajak mengadakan diklat atau pendidikan khusus bagi aparat pajak.

Dalam rangka lebih memantapkan hasil dan tujuan perpajakan yang baik, maka perlu didukung tersedianya petugas operasional di instansi perpajakan yang mempunyai dedikasi yang tinggi, mempunyai keahlian dan kecakapan yang cukup di bidangnya serta bermental bersih dan dapat diandalkan.

Ditjen Pajak dalam hal ini, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat pajak untuk memenuhi tugas dan kewajiban aparat pajak dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pajak. Usaha peningkatan kualitas aparat pajak dilakukan melalui pendidikan lanjutan untuk peningkatan kemampuan teknis maupun non teknis. yaitu melalui diklat atau kursus

singkat secara berkala, atau mengirimkan pegawainya untuk melakukan study lanjutan ke S2 atau S3. Disamping itu, perlu juga untuk melaksanakan pengawasan dalam tubuh Ditjen Pajak sendiri agar dapat dicegah seminimal mungkin kolusi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan aparat pajak.

3.3. Upaya Pemerintah Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebagaimana Yang Diamanatkan Reformasi Perpajakan Nasional.

3.3.1. Reformasi UU Perpajakan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Peranan pajak sebagai sumber dana utama dalam pembiayaan pembangunan makin terasa penting setelah *booming migas* berakhir dan juga makin sulitnya mendapat bantuan dana luar negeri, maka pajak dijadikan sebagai perwujudan dari kemampuan sendiri untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan dari penjualan migas yang sangat rentan dengan faktor-faktor eksternal. Segi ekonomi, kemandirian diartikan sebagai pengurangan ketergantungan perekonomian terhadap luar negeri dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pengalihan potensi yang ada. Segi politik, kemandirian diartikan sebagai peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam meningkatkan penerimaan negara, menurut Dirjen Pajak Machfud Sidik (pada waktu itu), pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan, meliputi :

- a. mendorong kepatuhan sukarela
- b. melakukan pendekatan terpadu dalam proses penerimaan pajak.

c. reformasi perpajakan secara berkesinambungan.¹⁴⁰

Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1983 dikenal dengan **Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN)**. Menurut Salamun A.T, tujuan dari pembaharuan sistem perpajakan yaitu :¹⁴¹

- a. Menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerakkan lagi segenap kemampuan nasional.
- b. Menyederhanakan sistem perpajakan, yang mencakup penyederhaan jenis pajak, tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.
- c. Menyusun sistem pembayaran pajak yang adil dan wajar, sehingga jumlah wajib pajak justru diharapkan akan semakin meningkat.
- d. Membenahi aparatur perpajakan yang meliputi pembenahan dan penataan prosedur, tata kerja, disiplindan mental pegawai.
- e. Membuat beban pajak semakin adil dan wajar.

Kebijaksanaan perpajakan dengan melalui reformasi ini, telah dilakukan oleh pemerintah beberapa kali yaitu : mulai tahun 1983 dan yang terakhir dengan perubahan melalui reformasi perpajakan tahun 2000. Langkah reformasi diharapkan semakin mengarah pada pada peningkatan terciptanya peran hukum sesuai dengan yang seharusnya (*law in order in place*). Tujuannya adalah terciptanya masyarakat yang sadar

140. Indra Ismawan, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 82.

141. A. Asikin, T. Noorjaya, Y. Himawati, Pajak , Citra dan Bebannya, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990.

hukum di kalangan Wajib Pajak, sehingga masyarakat dengan sukarela mau membayar pajaknya. Juga untuk mencapai pertumbuhan penerimaan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang ditujukan pada 4 tujuan pendukungnya yaitu : penyerderhaan, pemerataan beban pajak, kepastian hukum dan menu-
tup peluang.

Reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini yaitu meliputi :

a. Reformasi Perpajakan tahun 1983

Reformasi ini meliputi reformasi hukum, reformasi sistem pemungutan pajak dan tata kerjanya.

a.1. Reformasi hukum

Yaitu mengganti UU pajak warisan administrasi kolonial dengan UU perpajakan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menetapkan UU sebagai berikut :

- 1) UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- 2) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- 3) UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM);
- 4) UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

a.2. Reformasi Sistem Pemungutan Pajak yaitu

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Sistem Official Assessment* menjadi *Sistem Self Assessment*.
(Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3 sub. 1

terdahulu).

a.3. Reformasi Organisasi dan Tata Laksana, meliputi :

- Mengganti nama Kantor Inspeksi Pajak dan Kantor Inspeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan kantor Pelayanan PBB.
- Mengganti Kantor Dinas LUar Menjadi Kantor Penyuluhan Pajak.

b. Reformasi Perpajakan tahun 1994

Adanya penyempurnaan dan perubahan dari UU pajak sebelumnya, yaitu :

- 1) UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP);
- 2) UU No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991;
- 3) UU No. 11 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU no. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPN.Bm.
- 4) UU No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB.

c. Reformasi Perpajakan tahun 1997.

Untuk melengkapi perangkat UU di bidang Keuangan, khususnya yang menyangkut penerimaan negara dan penerimaan daerah, maka adanya reformasi perpajakan tahun 1997 yang meliputi :

- 1) UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- 2) UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Re-distribusi Daerah;
- 3) UU No.19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak Dengan

Surat Paksa;

4) UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

5) UU No.21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

d. Reformasi Perpajakan tahun 2000

Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang, juga sebagai upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka dipandang perlu dilakukan perubahan peraturan perpajakan, guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya bidang ekonomi serta sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Sehingga pemerintah melakukan reformasi perpajakan pada tahun 2000 yaitu dengan mengadakan perubahan perundang-undangan perpajakan, yang meliputi :

- 1) Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- 2) Undang- Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- 3) Undang-Undang No. ,18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- 4) Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagi-

han Pajak dengan Surat Paksa;

- 5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Perubahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kelima undang-Undang tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Dengan adanya reformasi perpajakan ini, pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan secara berkesinambungan, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak juga dapat memberikan landasan hukum yang kokoh, adil, tegas dan jelas, khususnya didalam pemungutan pajak.

Dari semua uraian sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi pajak ini tujuannya adalah untuk penyederhanaan, penertiban dan kepastian hukum terhadap sistem perpajakan. Penyederhanaan ini meliputi jenis pajak, jumlah pajak, cara pemungutannya. Penertiban lebih dititik beratkan pada manusia-manusianya, baik berkenaan dengan *fiskus* maupun wajib pajak sehingga akan memberi pengaruh dan akibat langsung bagi peningkatan hasil-hasil pajak yang masuk ke kas negara.

Reformasi perpajakan sebagaimana disebutkan diatas, telah menunjukkan bagaimana hukum digunakan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, dan ini merupakan ciri dari hukum modern. Menurut David M. Trubek bahwa hukum modern sebagai suatu proses sosial tertentu yang muncul dari proses perkembangan pada umumnya. 3 ciri pokoknya adalah :

1. Merupakan sistem peraturan.

2. Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.
3. Merupakan bagian tetapi juga sekaligus otonom terhadap negara.¹⁴²

Perubahan peraturan perpajakan melalui reformasi perpajakan ini tidaklah semata-mata didominasi oleh keinginan pemegang kekuasaan, melainkan juga disebabkan oleh adanya masukan-masukan berupa perubahan ekonomi nasional maupun global. Khususnya masukan yang berasal dari kondisi perkembangan ekonomi baik nasional maupun internasional.

Adanya kebijakan reformasi perpajakan ini, menurut penulis telah melahirkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang lebih akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang dimasyarakat.

Pembaharuan Perpajakan Nasional (reformasi perpajakan) sejak tahun 1983 sebagaimana didalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara mengganti migas serta menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Efektifitas pendayagunaan pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat dilihat dari sisi penerimaan pemerintah. Melalui reformasi perpajakan mulai tahun 1983 sampai pada reformasi terakhir tahun 2000, tersebut ternyata penerimaan pajak menunjukkan adanya kenaikan yang sangat berarti.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut dibawah :

142. Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial. Alumni, Bandung, 1983, hal. 148.

PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP APBN
DAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
(dalam Milyar rupiah)

Tahun (1)	Penerimaan pajak (2)	Volume APBN (3)	% (4=2:3)	Penerimaan Dalam Negeri (5)	% (6=2:5)
Pelita IV					
1984/1985	3.294,60	19.383,50	17,00	15.905,50	20,70
1985/1986	5.015,40	22.825,40	22,00	19.252,80	26,10
1986/1987	5.551,00	21.892,80	25,40	16.140,60	34,40
1987/1988	6.551,80	26.961,30	24,30	20.803,30	31,50
1988/1989	9.171,00	32.995,00	27,80	20.004,30	39,90
PELITA V					
1989/1990	12.190,30	38.169,10	31,90	28.739,80	42,40
1990/1991	15.272,50	49.451,00	30,90	39.546,40	38,60
1991/1992	19.683,70	51.993,90	37,90	41.584,80	47,30
1992/1993	24.087,50	58.168,20	41,40	47.452,50	50,80
1993/1994	29.375,00	62.651,70	46,90	52.279,80	56,20
PELITA VI					
1994/1995	33.991,90	69.749,10	48,70	59.737,10	56,90
1995/1996	41.876,90	78.024,30	53,60	66.265,20	57,50
1996/1997	50.502,00	90.616,40	55,70	78.202,80	64,60
1997/1998	56.857,00	101.086,40	56,30	88.060,70	64,60
1998/1999	72.930,80	263.888,10	27,64	149.302,50	48,85
1999/2000	94.039,70	218.203,80	43,09	140.803,80	66,79
2000	97.780,60	183.069,20	53,41	137.695,60	71,01

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 1999/2000

Dengan melihat prestasi pajak pada tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa pada tahun Anggaran 1984/1985, yaitu pada saat UU perpajakan 1983 mulai penerimaan pajak sebesar Rp. 3.294,60 Milyar, dengan posisi pajak terhadap struktur penerimaan dalam negeri hanya menempati angka 20,70 %. Sepuluh tahun kemudian pada tahun Anggaran 1994/1995 penerimaan pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 33.991,90 milyar dengan posisi struktur penerimaan dalam negeri pajak sebesar 56,90 %. Dan terakhir pada tahun Anggaran 2000 penerimaan pajak mengalami kenaikan juga

yaitu sebesar Rp. 97.780,60 milyar. Dari data tersebut jelas menunjukkan bahwa selama ini penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan bahkan penerimaan pada tahun 2000 mencapai 53,41 % dari APBN, hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan tulang punggung pada penerimaan negara kita sekarang. Makin tingginya proporsi penerimaan pajak pada APBN, menunjukkan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah selama ini dalam hal penerimaan pajak telah berjalan efektif.

Selaras dengan tujuan reformasi perpajakan , maka hendaknya reformasi perpajakan menurut Gunadi harus diarahkan ke berbagai aspek yaitu :

1. Diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara (*revenue enchancement*);
2. Untuk menekan biaya efisiensi perpajakan (*the efficiency cost of taxation*) sehingga dapat dikurangi distorsi;
3. Dapat mengurangi beban pajak pada kelompok bawah (miskin) dan mengusahakan agar sistem dan struktur pajak lebih adil baik secara horisontal maupun vertikal;
4. Reformasi perpajakan memperkuat pengadministrasian pajak dengan karakteristik mudah, murah, akurat, cepat, tepat dan aman.¹⁴³

Untuk mencapai keberhasilan didalam meningkatkan penerimaan pajak, menurut penulis hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Sistem Perpajakannya

Pajak merupakan pungutan pemerintah (*public sector*) terhadap sektor swasta (*private sector*) dipastikan

143. Berita Pajak, No. 1441/Tahun XXXII/1 Maret 2000, hal. 45.

akan mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat luas. Pengaruh ini sering dirasakan anggota masyarakat yang belum sadar di dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Adanya pengaruh yang besar terhadap pola tingkah laku masyarakat yang harus diperhatikan dalam menentukan sistem perpajakan. Sehingga dalam hal ini pemerintah telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem perpajakannya, yaitu dimulai adanya reformasi perpajakan tahun 1983 dengan merubah struktur undang-undang perpajakan yaitu dari *Sistem Official Assessment* menjadi *Sistem Self Assessment*. Reformasi tersebut terus bergulir dan terakhir pada tahun 2000 (telah dijelaskan diatas pada sub bab 3.1). Reformasi tersebut telah merubah dan menyempurnakan perundang-undangan perpajakan.

b. Masyarakat yaitu Wajib Pajak

Di dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib pajak merupakan unsur yang dominan dalam suksesnya penerimaan pajak. Pajak akan berhasil dipungut dalam masyarakat yang tingkat kepatuhannya tinggi.

Dalam pemungutan pajak dengan *Sistem Self Assessment*, kunci utama keberhasilannya adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak antara lain, meliputi :

- a. Pendidikan dan informasi perpajakan;
- b. *Government policy* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. *Law Enforcement* yang benar;

- d. Efektivitas otoritas pajak;
- e. Keadilan pemungutan pajak itu sendiri, termasuk didalamnya tarif efektif pajak dibandingkan penghasilan;
- f. Pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan memenuhi harapan para pembayar pajak.¹⁴⁴
- c. Faktor ekonomi, sosial budaya dan politik negara.

Masalah perpajakan bukanlah semata-mata masalah administrasi perpajakan saja, tetapi masalah perpajakan adalah masalah seluruh komponen masyarakat. Sehingga suatu hal yang mustahil, adanya kepatuhan dan penerimaan pajak meningkat bila perekonomian nasional memburuk, politik dan keamanan nasional kacau dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat menentangnya.

d. Efektivitas administrator/otoritas pajak.

Efektivitas dari aparat pajak dalam menjalankan misinya yaitu administrasi perpajakan merupakan titik sentral dari keberhasilan suatu pemungutan pajak. dalam hal ini. Direktorat Jenderal Pajak telah bertekad untuk terus menerus melakukan reformasi administrasi perpajakan yaitu pada :

- a) Organisasi Direktorat Jenderal Pajak;
- b) Sistem dan Prosedur
- c) Sumber Daya Manusia

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terus menerus dikaji efektivitasnya, sehingga sering adanya perubahan-

144. Muhammad Said, Pemungutan Pajak dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi, Makalah Orasi Wisuda Program D1 Perpajakan Tanggal 23 September 2000. Semarang, hal.4.

perubahan dalam organisasi Dirjen Pajak, misal adanya pejabat fungsional, dibentuknya Unit Esselon yang mengelola data dan informasi perpajakan berbasis teknologi terkini serta unit yang mengelola masalah penyuluhan pajak.

Sistem dan prosedur kerja dalam pemungutan pajak terus menerus berkembang. Saat ini pencatatan pembayaran pajak dilakukan dengan perekaman ke komputer, setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan kebenaran secara fisik berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima secara langsung maupun yang diterima dari KPKN (Kantor Pusat Keuangan Negara) dengan penggunaan komputer secara on line.

Sumber Daya Manusia sebagai unsur yang dominan dalam suatu organisasi, maka Dirjen Pajak terus menerus melakukan program-program pendidikan dan pelatihan.

Peran pajak untuk beberapa tahun kedepan akan semakin berat, hal ini disebabkan krisis ekonomi yang masih dalam proses pemulihan (*recovery*) dan stabilitas sosial politik yang masih akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang mempengaruhi penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan.¹⁴⁵ Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yaitu salah satunya adanya perubahan dan penyempurnaan atas perundang-undangan perpa-

145. Macfud Sidik, *Strategi Perpajakan Nasional Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi*, Berita Pajak, No.1427/tahun XXXIII/15 September 2000.

jakan yaitu reformasi perpajakan (sebagaimana dijelaskan dimuka).

3.3.2. Perubahan UU Pajak Penghasilan tahun 2000

Khususnya didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu telah mengalami perubahan UU sampai tiga kali yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1983, diubah dengan UU No. 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai efektif berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Sebagaimana dimaklumi bahwa prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam UU pajak negara yang berlaku saat ini adalah :

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara secara gotong-royong;
- b. Wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk menghitung, menyeter dan melaporkan kewajiban pajaknya. Aparat perpajakan dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
- c. Secara keseluruhan lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum melalui perluasan basis pengenaan pajak dan penyederhanaan sistem pemungutannya;
- d. Penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan dengan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan demikian pula bagi aparat pajak untuk mengawasi pemenuhan wajib pajak tersebut;

- e. Obyek dan hubungan pajak dibuat seluas mungkin dengan tetap memperhatikan asas keadilan dalam pemungutan pajak;
- f. Meskipun penerimaan perlu terus ditingkatkan, namun sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi nasional, sistem perpajakan harus tetap menarik bagi iklim investasi;
- g. Selain itu pengenaan pajak secara berganda sedapat mungkin dihindarkan.¹⁴⁶

Prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi acuan dalam merumuskan UU PPh agar sejalan dengan tujuan perpajakan nasional.

Sesuai dengan penjelasan umum dalam UU No. 17 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa alasan beberapa perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu :

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Perubahan-perubahan yang terjadi dengan di Undang-Undangkannya UU No. 17 tahun 2000 tentang PPh ini, yaitu meliputi :

146. Machfud Sidik, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Desentralisasi di Bidang Keuangan Daerah, Makalah disampaikan dalam Seminar Perpajakan dalam rangka Dies Natalis UNDIP XL tanggal 18 Oktober 1997, hal. 9.

a. Peningkatan Keadilan Pajak

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam pemajakan atas pajak penghasilan yang harus dijadikan sebagai suatu kriteria pemilihan, perumusan dan penilaian kebijakan dan ketentuan perpajakan. Maka untuk meningkatkan keadilan dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu berupa :

(1) Restrukturisasi Tarif Pajak (Pasal 17)

Adanya perubahan tarif pajak ini, sebagai upaya untuk dapat merangkul semua subyek pajak dalam jaringan sistem pajak, dan adanya harmonisasi dengan tarif yang berlaku di kawasan ASEAN, dapat meringankan beban pajak kelompok menengah kebawah dan meningkatkan rasa keadilan vertikal kelompok menengah keatas, adanya perubahan tarif pajak penghasilan Orang Pribadi diperbesar dari 3 lapis menjadi 5 lapis yaitu :

**Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi
UU No. 10 tahun 1994 (Lama)**

Lapisan Kena Pajak	Tarif
0 - Rp.25.000.000	10 %
Rp.25.000.000 - Rp. 50.000.000	15 %
> Rp. 50.000.000	30%

UU No. 17 tahun 2000 (Baru)

Lapisan Kena Pajak	Tarif
0 - Rp.25.000.000	5 %
Rp.25.000.000 - Rp. 50.000.000	10 %
Rp.50.000.000 - Rp. 100.000.000	15 %
Rp.100.000.000 - Rp. 200.000.000	25 %
> Rp. 200.000.000	35 %

Adanya tarif pajak yang baru ini diperkirakan akan berdampak *negative* terhadap penerimaan pajak yaitu penurunan. Namun dari sisi Wajib Pajak tarif tersebut dirasakan semakin adil dan murah untuk kelompok menengah ke bawah (misal semula membayar 10 % kini menjadi 5 %).

Dalam hal ini hubungannya dengan *sistem self assessment*, tarif yang menjadi lebih rendah tersebut, diharapkan akan memberi inisiatif pada Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang taat membayar pajaknya.

Sedangkan untuk pajak penghasilan badan tarifnya tetap dipertahankan, namun lapisan kena pajaknya diperbesar menjadi dua kali lipat.

Tarif Wajib Pajak Badan
UU No. 17 tahun 2000 (Tetap)

Lapisan Kena Pajak	Tarif
0 - Rp.50.000.000	10 %
Rp.50.000.000 - Rp. 100.000.000	15 %
> Rp. 100.000.000	30%

Hal ini untuk menjaga daya saing global, tarif tersebut apabila dipandang perlu dapat diturunkan menjadi 25 % (Pasal 17 ayat (2))

(2) Kewajiban NPWP

Pada UU No. 17 tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan, yaitu dihapuskannya Pasal 21 ayat (6) UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan:

" Bahwa untuk wajib Pajak yang hanya memperoleh pekerjaan dari satu pemberi kerja, potongan pajak penghasilan dari satu pemberi kerja menjadi final."

Maksud dari pasal ini , bahwa yang mempunyai penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja tidak wajib ber-NPWP. Sehingga dengan dihapuskannya pasal tersebut, mulai sekarang setiap orang yang mempunyai penghasilan diatas jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diwajibkan untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini diharapkan memberi peluang untuk dapat menjangkau Wajib Pajak lebih banyak, sehingga diharapkan akan terjadinya peningkatan penerimaan pajak.

b. Kemudahan bagi Wajib Pajak

1) Penghasilan Tidak Kena Pajak (Pasal 7 ayat (1))

Sebagai pajak subyektif, maka pajak penghasilan Orang Pribadi harus memperhatikan keadaan subyek pajak. Refleksi tersebut diwujudkan dengan pemberian kelonggaran (batas pemajakan) dalam bentuk PTKP yang jumlahnya dikaitkan dengan keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Perubahan jumlah PTKP dalam pasal 7 ayat (1), yaitu :

- a. Wajib Pajak belum menikah Rp. 2.880.000/thn
- b. Tambahan Wajib Pajak Kawin Rp. 1.440.000/thn
- c. Tambahan Wajib Pajak isteri bekerja Rp. 2.880.000/thn
- d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga/tanggungan (maksimal 3 orang) Rp. 1.440.000/thn/orang.

Perubahan pasal tersebut hanyalah penegasan apa yang berlaku sekarang, sebelumnya diatur di dalam aturan yang lebih rendah yaitu pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 361/KMK/4/1998 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2) Penggunaan Norma Penghitungan

Pembukuan yang baik dan tertib merupakan salah satu prasyarat berhasilnya Sistem *Self Assessment*, namun mengingat belum semua pengusaha mampu menyelenggarakan pembukuan, pemakaian norma penghitungan penghasilan neto oleh pengusaha dengan omset tahunan kurang dari Rp. 600 juta masih dipertahankan.

Adanya 2 jenis norma penghitungan, yaitu :

a. Norma penghitungan Penghasilan Netto

(Pasal 14)

b. Norma penghitungan khusus (Pasal 15)

Berbeda dengan norma penghitungan umum pada dasarnya eksistensinya disebabkan tidak adanya pembukuan, norma penghitungan khusus tetap diperlukan walaupun terdapat pembukuan yang baik. Pada perusahaan tertentu karena berbagai hal (alokasi biaya, penyusutan, penghasilan dan sebagainya) menghendaki adanya alat bantu yang lebih praktis dan pasti yaitu norma penghitungan.

Hal ini memang selaras dengan fakta yang terjadi dalam praktek yang masih tetap mempertahankan norma penghitungan Pajak Penghasilan netto. Dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep - 536/PJ./2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat menghitung Penghasi-

lan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Bagi pengusaha kecil dan menengah umumnya masih tertalu jauh dengan praktek pembukuan, terutama sektor informal masih digunakan pencatatan.

Sebagai tahapan menuju pembukuan agar *self assessment* dapat dilaksanakan dengan baik, untuk sementara wajib menyelenggarakan pencatatan atas penghasilan brutonya (penjualan atau penyerahan), dan bila saatnya nanti akan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep- 520/PJ./2000 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

(3). Pembayaran Angsuran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Melalui pasal 25 ayat (7) dan ayat (9) pada revisi UU PPh tahun 2000 memperkenalkan *simple tax system* untuk Wajib Pajak tertentu yaitu misalnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, dengan melalui keputusan Menteri Keuangan, angsuran pajak pengusaha tersebut untuk kesederhanaan, kemudahan dan kepastian, dengan ditentukan sekian persen.

Diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dan dilaksanakan dengan Keputu-

san Direktur Jenderal Pajak No. Kep-547/PJ./2000 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Perusahaan Tertentu.

c. Menunjang Kebijakan Pemerintah

1) Otonomi Daerah

Suksesnya otonomi daerah antara lain tergantung pada ketersediaan dana yang berasal dari daerah tersebut. Maka pada pasal 31 C UU PPh diatur tentang pembagian penerimaan pajak oleh pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja di bagi yaitu 80% untuk pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar".

Perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya sebagai penyeimbang dengan tumbuh dan berkembangnya bidang usaha yang tidak dapat dilepaskan dari peraturan-peraturan bidang perpajakan, dimaksudkan juga sebagai langkah antisipatif dari pihak pemerintah dalam menghadapi kemajuan-kemajuan di bidang usaha, agar bidang usaha baru tetap menjadi obyek pajak dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan sebagai upaya mewujudkan rasa keadilan, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya ekstensifikasi dan intensifikasi bidang perpajakan serta penegakan supremasi hukum.¹⁴⁷

147. Nur Hidayat. Berita Pajak No. 1453/Tahun XXXIV/15 Oktober 2001.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dengan adanya perubahan Undang-Undang atas Pajak Penghasilan tahun 2000 tersebut yaitu mempunyai tujuan selain untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi dan mendorong pemulihan ekonomi dengan adanya krisis ekonomi adalah untuk **meningkatkan Penerimaan Pajak**.

Untuk itu langkah-langkah yang telah ditempuh fiskus dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan, antara lain meliputi :¹⁴⁸

- a. Penggalian potensi pajak, dilakukan dengan cara :
 - ekstensifikasi yaitu menambah jumlah wajib pajak.
 - intensifikasi yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan.

Dengan sistem dan prosedur pemungutan yang sederhana, sistematis, mudah, simpel dan aman akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang upaya intensifikasi pemungutan pajak. Disamping itu dengan sistem yang baik juga akan dapat menekan terjadinya kebocoran yang selama ini disinyalir masih banyak terjadi.
- c. Peningkatan profesionalisme petugas

Dengan profesionalnya petugas pemungutan pajak, maka tidak mudah dicurangi/dikelabui oleh wajib pajak. Sehingga terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak dapat diperkecil. Juga dapat mengantisipasi dan melihat peluang-peluang yang mungkin masih dapat digali menjadi

148. Wawancara dengan Bp. Amiruddin Kasi PPh Orang Pribadi KPP Semarang Selatan tanggal 1 agustus 2001, dan Bp. Ali R. Sholeh, Kasubsi. IAP, Kanwil Pajak VIII Jawa Tengah dan DIY tanggal 26 Juli 2001.

sumber penerimaan pajak.

d. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas.

Faktor efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan perlu terus di tingkatkan artinya dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan harus diupayakan dengan biaya sekecil mungkin dengan hasil yang sebesar-besarnya, sehingga meskipun efisien tetapi harus tetap efektif.

e. Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi

Untuk mendidik Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.3. Keunggulan strategis dan kelemahan-kelemahan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Adanya Perubahan UU No. 17 tahun tentang Pajak Penghasilan tersebut, penulis menemukan adanya keunggulan-keunggulan yang strategis, daripada peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Keunggulan-Keunggulan strategis pada UU No. 17 tahun 2000 tersebut, yaitu meliputi:

1. Berkaitan erat dengan pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka mulai tahun 2001 adanya Pembagian hasil atas Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat kepada Pemerintah Daerah. Yaitu pada Pasal 31 C UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan

imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20 % untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah RI No. 115 tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini sebagai upaya pemerintah memenuhi tuntutan dari beberapa daerah tentang otonomi Daerah, agar sebagian hasil dari penerimaan Pajak Pusat seperti Pajak Penghasilan yang ditarik dari lokasi daerah setempat dapat menjadi bagian dari penerimaan daerah. Hal ini secara politis akan dapat meredam sebagian tuntutan disintegrasi yang saat ini muncul di beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian pemerintah daerah akan ikut aktif di dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan, yang selama ini hanya dianggap tugas pemerintah pusat.

2. Adanya penurunan Tarif Pajak yaitu pada Pasal 17, khususnya pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi menjadi 5 lapisan Pajak yaitu dengan tarif 5%, 10%, 15%, 25%, dan 35 % ini lebih meringankan beban pajak bagi kelompok menengah ke bawah dan meningkatkan rasa keadilan vertikal¹⁴⁹ kelompok menengah keatas. Karena dirasa semakin adil dan semakin murah tarif pajak penghasilan ini, maka bagi kelompok menengah ke bawah yang semula harus membayar 10 % menjadi 5 % diharapkan akan dapat meningkatkan tax coverage (menambah wajib pajak baru) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Sehingga

149. Keadilan Vertikal adalah keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajak yang berbeda apabila jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak berbeda, semakin besar jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak, semakin besar tarif pajak yang harus dikenakan. (R. Mansury, Op.cit, hal. 69.

dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Dihapusnya pasal 21 ayat (6) UU No. 10 tahun 1994 pada UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa untuk Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja potongan pajak penghasilan Pasal 21 menjadi final.

Dengan dihapusnya ketentuan ini tentunya memberi kesempatan adanya **ekstensifikasi** bahwa setiap orang yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga akan semakin besar jumlah Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan yang mempunyai NPWP dan sehingga diharapkan akan semakin besar pula penerimaan pajak.

4. Adanya penyederhanaan sistem pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pengusaha Tertentu yaitu Wajib Pajak yang mempunyai tempat usaha yang tersebar di beberapa tempat, untuk kesederhanaan, kemudahan dan kepastian pembayaran angsuran pajak tidak disentralisasikan pada suatu tempat melainkan perlokasi usaha. (Pasal 25 ayat (7) dan ayat (9) UU No. 17 Tahun 2000.

Diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-547/PJ./2000 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Perusahaan Tertentu.

Selain adanya keunggulan strategis dari UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga dari UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, ditemukan adanya beberapa kelemahan-kelemahan dari UU tersebut, yaitu :

1. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan:

" Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa pungutan Pajak penghasilan ini dinyatakan sebagai pajak yang bersifat final.

Pajak Final tersebut bertentangan dengan ketentuan materiil dari UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan itu sendiri, yaitu bagaimana cara menentukan obyek PPh dan besarnya pajak yang terutang (telah dijelaskan pada sub bab 3.1 . Selain itu PPh final ini juga telah merubah fungsi dari UU Pajak Penghasilan yang merupakan pungutan pajak langsung menjadi tidak langsung seperti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pungutan PPh untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu pada pasal 25 ayat (8), yang menyatakan :

" Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan Pemerintah ".

Pasal tersebut sebenarnya tidak tepat jika dikenakan sebagai pajak penghasilan. Sebab belum tentu mereka itu (orang yang keluar negeri) sebagai subyek dan obyek pajak penghasilan.

Pada pasal 1 UU PPh, bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap sunyek pajak atas penghasilan yangt diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) merinci jenis dari penghasilan yang menjadi obyek pajak.

Orang pergi keluar negeri ini, belum tentu menyebabkan timbulnya penghasilan. Dengan demikian pasal 25 ayat (8) ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) UU PPh. Hal ini menunjukkan bahwa pasal satu dengan pasal lainnya tidak konsisten.

Jika memang hendak mengenakan pajak kepada setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri, sebaiknya diatur dengan UU tersendiri, yang bersifat pungutan pajak Obyektif, bukan pada pajak penghasilan.

3. Dalam rangka melaksanakan pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 536/P.J/2000 tentang Norma Penghitungan Pajak Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Adanya Keputusan ini, khususnya bagi Pengusaha Kecil yang menggunakan norma penghitungan pajak penghasilan neto sangat memberatkan Wajib Pajak Orang Pribadi. Walaupun pada tarif pajak pasal 17 UU PPh mengalami penurunan, tapi tarif perhitungan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto mengalami kenaikan pada Kep. Dir Jen No. 536/P.J/2000 ini. Khususnya bagi perdagangan eceran yaitu :

- perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung;
- perdagangan eceran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan;
- perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan, pertenunan, perajutan, hasil pengolahan kulit, termasuk barang keperluan kaki;

- perdagangan eceran perabot rumah tangga dan dapur.

Adanya kenaikan tarif, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dari tarif 10 % menjadi 30 % (mengalami kenaikan sampai 200%).

Hal ini tentunya akan menjadikan jumlah penghasilan netto menjadi sangat tinggi, padahal laba yang diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi dengan pengeluaran tidak sesuai dengan kenaikan tarif pajak tersebut.

Misalnya : Pengusaha A membayar SPT 1770 tahun 2000 sebesar Rp. 300.000/setahun, maka pada tahun 2001 dengan penjualan dan omset yang sama akan membayar pajak penghasilannya sebesar Rp. 900.000,-/setahun. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan bagi Wajib Pajak tersebut.

Maka hendaknya pemerintah meninjau kembali Kep. Dir. Pajak No. 536/P.J/2001 tersebut, sehingga dengan pemberlakuan keputusan tersebut tidak menyebabkan pengusaha sebagai Wajib Pajak enggan melaporkan kegiatan usahanya atau sengaja menghindari pajak. Bila terjadi hal demikian tentunya tidak sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan untuk dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak tentunya juga akan dapat mengurangi usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

4. Dengan dihapuskannya ketentuan pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) pada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada UU No. 10 Tahun 1994 juga pada UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka tidak adanya jaminan

kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan *Self Assessment* yang sebenarnya. Karena fiskus dapat menetapkan Surat Ketetapan Pajak dengan sekehendak hatinya sendiri.

Pasal 30 ayat (4) dan (5) yang dihapus tersebut adalah :
(4) Jumlah pajak yang terutang menurut SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut UU ini.

(5) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapat bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan itu tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

5. Kurang sosialisasinya perubahan UU ini pada masyarakat, sehingga masih banyaknya masyarakat Wajib pajak tidak mengetahui perubahan perundang-undangan tersebut.

Maka sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terus berupaya untuk berbenah dalam memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang masih terjadi baik dalam aturan-aturan yang ada maupun dalam pelaksanaannya agar dapat menjadi lebih baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sistem *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang menempatkan Wajib pajak berperan aktif dalam kewajiban perpajakannya. Peran aktif wajib pajak dengan pemberian kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri obyek pajaknya, menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Sistem ini telah diberlakukan sejak tahun 1984 (*tax reform I*) sampai sekarang. Hal ini diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ternyata didalam pelaksanaan sistem *self assessment* sampai sekarang tidak dapat dilaksanakan secara murni (*full self assessment*) sebagaimana yang dikehendaki undang-undang, karena dalam pelaksanaannya masih adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan sistem tersebut. Hal ini dibuktikan dengan :

- a) Masih adanya peran aktif dari fiskus yaitu dengan mengirim SPT ke alamat Wajib Pajak (*official assessment*) bagi SPT yang tidak diambil sendiri Wajib Pajak sampai batas waktunya.
- b) Adanya pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga

(sistem *with holding*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 26 UU Pajak Penghasilan.

- c) Pemeriksaan pajak yang mengarah pada *official assessment* dengan adanya praduga bersalah pada setiap wajib pajak.
- d) Diterbitkannya NPWP secara jabatan oleh fiskus.
- e) Masih adanya pemungutan pajak yang bersifat final.

2.a) Sistem *Self Assessment* didalam pelaksanaannya pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Semarang berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata belum dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Hambatan Intern meliputi : kurangnya sarana dan prasana yang mendukung, kurangnya informasi fiskus tentang perkembangan usaha Wajib Pajak, terlalu seringnya UU berubah, dan ketidaktegasan di dalam penerapan sanksi hukumnya.
2. Hambatan Eksternal meliputi : Kurangnya kesadaran hukum Wajib Pajak mengenai arti pentingnya pajak, kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak Penghasilan, dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

b) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang, didalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Sistem Self Assessment* pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini yaitu dengan melakukan penyuluhan perpajakan,meningkatkan pelayanan

perpajakan, kerjasama dengan instansi lain yang terkait, peningkatan sarana dan prasarana juga peningkatan Sumber Daya Manusia

- 3.a. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi global yang semakin pesat, maka pemerintah melakukan beberapa kali penyempurnaan perundang undangan perpajakan yaitu pada tahun 1983, 1994, 1997 dan terakhir pada tahun 2000. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi penerimaan negara yaitu meliputi : Sistem Perpajakannya, Masyarakat sebagai Wajib Pajak; Ekonomi, sosial budaya dan politik negara; dan efektivitas administrator atau otoritas pajak.
- b. Di dalam reformasi perpajakan tahun 2000, adanya perubahan terhadap Pajak Penghasilan yaitu melalui UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mulai efektif berlakunya tanggal 1 Januari 2001, dengan tujuan dapat meningkatkan iklim dunia usaha dan investasi juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
- c.1) Keunggulan strategis dari UU NO. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, meliputi :
 - (a) Adanya pembagian Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat dan Pajak daerah yaitu dengan pembagian 80 % untuk pemerintah pusat dan 20 % untuk pemerintah daerah.
 - (b) Penurunan Tarif Pajak melalui Pasal 17 , khususnya pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi

menjadi 5 lapisan pajak dengan tarif 5 %, 10 %, 15 %, 25% dan 35 % dirasakan lebih meringankan beban pajak bagi kelompok menengah kebawah, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- (c) Dengan dihapusnya Pasal 21 ayat (6) UU No. 10 tahun 1994 pada UU No. 17 tahun 2000, maka adanya kesempatan untuk *ekstensifikasi* pada setiap orang yang berpenghasilan diatas PTKP harus mempunyai NPWP. Dengan semakin bertambahnya NPWP maka akan bertambah pula penerimaan negara dari Pajak Penghasilan.
 - (d) Adanya kemudahan , kesederhanaan dan kepastian dalam pembayaran angsuran pajak tidak disentralisasikan pada suatu tempat melainkan perlokasi usaha.
- 2) Kelemahan-kelemahan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :
- (a) Masih adanya pajak final yaitu pada Pasal 4 ayat (2). Pajak Final bertentangan dengan ketentuan materiil dari Pajak Penghasilan itu sendiri yaitu dalam hal menentukan obyek pajak penghasilan dan besarnya pajak yang terutang.
 - (b) Pungutan pajak penghasilan yang melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu pada Pasal 25 ayat (8), tidak tepat karena jika dikenakan sebagai pajak penghasilan. Sebab belum tentu setiap orang keluar negeri berpenghasilan yaitu sebagai subyek pajak dan obyek pajak. Pasal ini

tidak konsisten dengan Pasal 1 UU PPh bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, dan juga dengan Pasal 4 ayat (1) tentang rincian jenis dari penghasilan yang menjadi obyek Pajak Penghasilan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat (2), (3) dan ayat (5) UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka dikeluarkan Keputusan Dir. Jen Pajak No. Kep. 536/P.J/2000 tentang Norma Penghitungan Pajak Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Perhitungan. Dengan adanya keputusan ini, tarif penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto mengalami kenaikan, khususnya bagi perdagangan eceran. Yaitu kenaikan khususnya pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tarif 10 % menjadi 30 %. Hal ini memberatkan Wajib Pajak karena jumlah penghasilan netonya menjadi tinggi mengakibatkan jumlah pajaknya pun semakin tinggi, padahal laba yang diperoleh setelah dikurangi pengeluarannya tidak sesuai dengan kenaikan tarif pajak tersebut.
- (4) Dihapusnya ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 7 tahun 1983, sejak tahun 1994 maka tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi Wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self assessment* yang sebenarnya, karena *fiskus* dapat menetapkan Surat Ketetapan Pajak dengan sekehendak hatinya.

- (5) Kurang sosialisasinya perubahan UU PPh pada masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat Wajib Pajak tidak mengetahui perubahan perundang-undangan tersebut.

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah perlu mengkaji ulang terhadap kebijakan *full self assessment* (*self assessment* murni) yang diterapkan di Indonesia. Sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat selama ini, ternyata *self assessment* secara murni lebih banyak dikorbankan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat saat ini, yaitu kebijakan yang mengarah pada sistem *semi self assessment* sehingga mempunyai kekuatan legitimasi.
2. Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh jajarannya meningkatkan profesionalisme, pelayanan prima dan integritas seluruh aparat pajak dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga diharapkan akan dapat mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Perlu adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai lembaga, organisasi dan institusi yang mempunyai pengaruh kuat terhadap anggota masyarakat, sehingga sosialisasi undang-undang perpajakan

akan terarah pada masyarakat wajib pajak dan citra perpajakan semakin baik serta sasaran *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* dapat tercapai secara optimal. Kerjasama tersebut antara lain dengan :

- a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. organisasi politik
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi profesi;
 - d. antar instansi pemerintah.
4. Perlu peningkatan *public service* dari semua aparatur pemerintah disemua Departemen atau instansi, agar Wajib Pajak melihat bahwa hasil pajak benar-benar untuk kepentingan masyarakat umum, dengan demikian Wajib Pajak akan makin sadar membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung, 1993.
- Asikin, Agustini, Tika Noorjaya dan Yulia Himawan, Pajak, Citra Dan Upaya Pembaharuannya, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1993.
- Boediono, B, Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan I, Modul 1-6, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1994.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Brotodihardjo, R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1995.
- Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990.
- Gunadi, Akuntansi Dan Pemeriksaan Pajak, Abdi Tandur, Jakarta, 1999.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad 20, Alumni, Bandung, 1994.
- Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan 1994 Dan Penyelesaiannya, Pustaka Tiara Mas, Surabaya, 1996.
- Ismawan, Indra, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001.
- Judisseno, Rimsky. K, Pajak dan Strategi Bisnis (Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- , Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jilid II, Pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- , dan Chistine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Lasmana, Eko, Sistem Perpajakan Di Indonesia, Buku Pertama, Prima Kampus Grafika, Jakarta, 1992.

- Mansury, R. Panduan Konsep Utama PPh Indonesia Jilid 1 (Uraian Umum dan tentang siapa-siapa yang ditujukan untuk dikenakan pajak), Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994.
- , Panduan Konsep Utama PPh Indonesia Jilid 2 (Tentang apa yang menyebabkan subyek pajak dikenakan pajak), Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995.
- , Panduan Konsep Utama PPh Indonesia Jilid 3 (Tentang perubahan undang-undang dalam tahun 1994), Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1996.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud. MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 1997.
- Meliala, Tulis. S, Perpajakan Dalam Teori Dan Praktek, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Miles, Matthew. B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru) UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Muljono, Eugenia Liliawati, Tanya-Jawab Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (KUP), Harvarindo, Jakarta, 1999.
- Munawir, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- , Perpajakan Untuk SLTA, BPFE, Yogyakarta, 1990.
- Musgrave, Richard. A dan Musgrave, Peggy B, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Mugodim, Perpajakan I Dasar-Dasar Hukum Pajak, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, FE, UII, Yogyakarta, 1993.
- , Perpajakan, Buku Dua, UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Nasution, S, dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report, Paper, Jemmars, Bandung, 1980.

- Pamudji, S, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Prawiraamidjaja, R.H.A.Rachman, Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal, Alumni, Bandung, 1980.
- Priantara, Diaz, Pemeriksaan dan Penvidikan Pajak, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- Petunjuk Praktis Perpajakan, Penerbit Berita Pajak, Jakarta, 1996.
- Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981.
- , Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1979.
- Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum. Apakah Hukum Itu ?, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Regar, Moenaf H, Pajak Penghasilan 1994 (Suatu Interpretasi dan Catatan), Erlangga, Jakarta, 1995.
- , Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntansi Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Sambodo, Agus, Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi (Tinjauan Dan Sisi Wajib Pajak), BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Sastrohadikusumo, R. Suryono, Beberapa Catatan Mengenai Pajak-Pajak Di Indonesia, Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak
- Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Soedarsono, Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Soekanto, Soerjono, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalan-
gan Hukum, Alumni, Bandung, 1979.

----- dan Srimamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers,
Jakarta, 1985.

-----, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan
Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdulah, Sosiologi Hukum
Dalam Masyarakat, Jakarta Pers, 1982.

Soemitro, Rochmat, Pajak Penghasilan, Eresco, Bandung,
1990.

-----, Asas Dan Dasar Perpajakan I, Eresco,
Bandung, 1992.

-----, Asas Dan Dasar Perpajakan II,
Eresco, Bandung, 1991.

-----, Asas Dan Dasar Perpajakan III, Eres-
co, Bandung, 1991.

-----, Pajak Dan Pembangunan, Eresco,
Bandung, 1988.

-----, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum,
Eresco,
Bandung, 1986.

-----, Peradilan Administrasi Dalam Hukum
Pajak Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1991.

-----, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eres-
co, Bandung, 1992.

-----, Hukum Pajak Internasional Indonesia
Perkembangan Dan Pengaruhnya, Eresco, Bandung,
1996.

Soemitro, Rony Hanityo, Metode Penelitian Hukum dan
Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soeparman, Perpajakan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1995.

Subekti, R. Tobias dan Asrori, Dasar-Dasar Perpajakan,
Modul 6-9, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta,
1986.

Surantono, Bambang, Pengetahuan Praktis Perpajakan,
Liberty, Yogyakarta, 1993.

- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain, Perpajakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.
- Tunggal, Hadi Setia, Tanya Jawab Pajak Penghasilan, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Tunggal, Amin Wijaya, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Utomo, YB. Sigit, Pajak Penghasilan, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Waluyo, Bambang, Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan, Sinar Grafika, 1991,
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan-undangan Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Zain, Moh dan Kustadi Arinta, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Alumni, Bandung, 1989.

MAKALAH dan JURNAL ,

- Hussein Kartasasmita, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Machfud Sidik, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Desentralisasi di Bidang Keuangan Daerah, Makalah disampaikan dalam Seminar Perpajakan dalam Rangka Dies Natalis UNDIP XL, Semarang 18 Oktober 1997.
- Malik, Fauzi, Masalah PPh Final dan Implementasinya, Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Bina Pajak Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia Bekerjasama Widyaiswara Pusdiklat Perpajakan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 15 Oktober 1997, Semarang.
- Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang 6 Desember 1997.
- _____, Segi-segi Keadilan kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Makalah Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke-41, Semarang, 25 September 1995.

-----, Sistem Dan Pelaksanaan Perpajakan di Indone-
sia, Seminar Nasional Perpajakan dalam Rangka Dies
Natalis UNDIP, Fakultas Ekonomi, Semarang, 18
Oktober 1997.

Said, Muhammad, Pemungutan Pajak dan Beberapa Faktor
Yang Mempengaruhi, Makalah Orasi Wisuda Program D1
Perpajakan, Semarang, tanggal 23 September.

HASIL PENELITIAN

Muhdi, 2001, Tesis : Implementasi Kebijakan Perpaja-
kan Dalam Kaitannya dengan Penerbitan NPWP secara
Jabatan Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi,
MIH, UNDIP, Semarang.

Raharjo, Noor, 1999, Tesis : Pemberdayaan Hukum Pajak
Dalam Ekonomi Global, MIH, UNDIP, Semarang.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasi-
lan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Un-
dang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Un-
dang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengha-
silan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga
Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah RI No. 115 Tahun 2000 tentang

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 130 tahun 2000 tentang Pengecualian Sebagai Obyek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.

Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Peraturan pemerintah No. 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.

Peraturan Pemerintah No. 139 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek.

Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 148 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 361/KMK/4/1998 tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 466/KMK.4/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Penghasilan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 520/PJ/2000 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-536/PJ./2000
tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi
Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto
Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-547/PJ./2000
tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam
Tahun Pajak Berjalan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

MAJALAH DAN KORAN

Berita Pajak, Majalah, No. 1390//1 Maret 1999.

-----, Majalah, No. 1412, 1 Pebruari Tahun 2000.

-----, Majalah, No. 1425, 15 Agustus 2000.

-----, Majalah, No. 1427, 15 September 2000.

-----, Majalah, No. 1441, 1 Maret 2000.

-----, Majalah, No. 1444, 1 Juni 2001.

Kompas, 14 April 1998

KAMUS

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,
1994.

- Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1995.